

**PERAN KELAS MENENGAH MUSLIM DALAM MENGHADAPI
ANCAMAN RADIKALISME DAN MEWUJUDKAN
TOLERANSI BERAGAMA PASCA REFORMASI**

HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN



**Peneliti:
ABDUL AZIZ, S.Pd.I, M.Si
NIP: 198007292009121004**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) WATAMPONE**

2015

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN
STAIN WATAMPONE 2015**

Judul Penelitian : PERAN KELAS MENENGAH MUSLIM
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN
RADIKALISME DAN MEWUJUDKAN
TOLERANSI BERAGAMA PASCA
REFORMASI

Jenis Penelitian : Penelitian Terapan (*Applied Research*)

Kategori Penelitian : Penelitian Individual

Bidang Ilmu Peneliti : Ilmu Politik

1. Identitas Peneliti

a. Nama : Abdul Aziz, S.Pd.I, M.Si

b. Jenis Kelamin : Laki-Laki

c. NIP : 198007292009121004

d. Pangkat/Gol : Penata / IIIc

e. Jabatan Fungsional : Lektor

2. Lama Penelitian : Empat Bulan

3. Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Watampone, 14 Oktober 2015

Mengetahui,
Kepala P3M STAIN Watampone



Dr. H. Mujahid, M.Ag.
NIP. 196104191992031002

Peneliti

Abdul Aziz, S.Pd.I, M.Si.
NIP. 198007292009121004

Mengesahkan,
Ketua STAIN Watampone



Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag.
NIP. 195412311981031058

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penelitian individual yang berjudul : "PERAN KELAS MENENGAH MUSLIM DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RADIKALISME DAN MEWUJUDKAN TOLERANSI BERAGAMA PASCA REFORMASI" ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Demikian juga shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang utusan Allah sebagai pembawa kebenaran ilahiyah, sebagai rahmat bagi sekalian alam dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka pengembangan keilmuan dan pendalaman pemikiran peneliti khususnya, dan diharapkan dapat memberi warna pencerahan bagi mahasiswa dan segenap civitas akademika di STAIN Watampone, serta bagi siapa pun yang memiliki minat dalam kajian politik Islam Indonesia. Meskipun harus diakui, bahwa penelitian ini sesungguhnya tidak terlepas dari berbagai kelemahan, namun bisa dijadikan sebagai pijakan bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

Dalam penelitian ini membahas seputar peran dan sepaik terjang kelas menengah muslim dalam menghadapi ancaman radikalisme dan mewujudkan toleransi beragama pasca reformasi (fokus kelas menengah muslim dalam penelitian ini adalah kelas menengah dari kelompok ulama pengasuh pondok pesantren dan para guru dan akademisi di perguruan tinggi). Kelas menengah sebagai dua kekuatan sosial (*social capital*) yang berpengaruh memiliki kontribusi besar pada terciptanya benteng pertahanan terhadap penyebaran paham radikal yang merajalela pasca reformasi.

Ternyata inilah salah satu alasan kuat mengapa paham radikal telah gagal menguasai Indonesia, sebaliknya hal tersebut membuat Indonesia tetap bertahan kuat dari serangan paham radikal. Inspirasi awal penelitian ini berangkat dari salah satu hasil kontemplasi peneliti, atau dapat dikatakan sebagai hasil pencermatan (tanggung jawab sosial) terhadap realitas empirik politik Islam di Indonesia pasca reformasi. Dari hasil penelitian terungkap bahwa ulama dan akademisi adalah dua kekuatan sosial yang sangat berpengaruh saat ini, hadir melalui berbagai peran penting dalam menangkal menyebarnya paham radikal terutama di kalangan pemuda.


Pada tahap selanjutnya sangat penting untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan pemerintah dan negara dalam rangka memperkuat keterlibatan masyarakat sipil (*civil society*) seperti ulama dan akademisi dalam gerakan massif melawan radikalisme dan terorisme. Disini terlihat bahwa gerakan masyarakat sipil telah menjelma menjadi partner negara dan bahkan menjadi ujung tombak (*main power*) penanggulangan radikalisme dan mewujudkan toleransi beragama pasca reformasi.

Penelitian ini tentu tidak terlepas sepenuhnya dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, peneliti selalu berharap adanya kritik, masukan, dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan penelitian ini, dan juga dapat menjadi bahan rujukan / perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang penelitian ini.

Pada akhirnya peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua STAIN Watampone yang telah mengalokasikan anggaran untuk penelitian ini, serta kepada semua pihak terutama Ketua dan para Staf P3M yang telah melaksanakan pengelolaan penelitian ini dengan sangat baik. Semoga apa yang telah dilakukan oleh semua pihak mampu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis

berharap penelitian ini mampu memberi manfaat kepada masyarakat, agama dan negara Indonesia.

Watampone, 14 Oktober 2015
Peneliti


Abdul Aziz, S.Pd.I, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Penelitian.....	10
C. Batasan Masalah	10
D. Signifikansi Permasalahan Penelitian.....	11
E. Kajian Riset Sebelumnya.....	12
F. Kerangka Teori	17
1. Konsep Kelas Menengah.....	17
2. Kelas Menengah Islam di Indonesia.....	20
3. Teori Hubungan Agama dan Negara.....	24
4. Konsep Radikalisme Agama	26
5. Teori Demokratisasi	31
6. Konsep Toleransi dan Intoleransi	33
7. Teori Konflik Beragama	36
G. Metode Penelitian	38
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	40
3. Teknik Analisis Data.....	41
Bab II HASIL PENELITIAN	
A. Peran Kelas Menengah Muslim Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme	44
1. Mengapa Peran Ulama.....	44
2. Bentuk-Bentuk Peran Kaum Ulama	49

3. Mengapa Peran Guru dan Akademisi	54
4. Bentuk-Bentuk Peran Guru dan Akademisi	58
B. Peran Kelas Menengah Muslim Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama	76
1. Menjadikan Kampus dan Sekolah Sebagai Basis Kehidupan Toleransi	76
2. Peran Ulama Dalam Membangun Semangat Toleransi	80
C. Kebijakan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Mewujudkan Toleransi Beragama	85
1. Pembangunan Karakter Warga Negara dan Revitalisasi Nilai Pancasila	85
2. Penguatan Peran FKPT dan Civil Society	89

Bab III PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Refleksi	97

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kelas menengah biasanya selalu dikaitkan dengan aspek munculnya perubahan sosial dan berkembangnya fase demokrasi, keberadaan dari suatu kelas menengah adalah prasyarat dari keberhasilan sebuah sistem demokrasi.¹ Sosok kelas menengah yang dimaksud disini yaitu kelas masyarakat atau kelompok warga negara yang menempati posisi independen dari campur tangan negara.

Meskipun di satu sisi, negara bisa saja memainkan peran penting dalam membina golongan kelas menengah ini yaitu melalui pemberdayaan dan partisipasi aktifnya dalam berbagai sektor strategis pembangunan. Harus diingat pula bahwa negara yang kuat dan mampu menciptakan stabilitas politik di tengah kehidupan masyarakat sangat bergantung dari seberapa mampu negara menjalin kolaborasi dengan berbagai kekuatan, sehingga tak pelak lagi peran kelas menengah menempati posisi strategis sebagai mitra negara / pemerintah dalam melindungi roda pembangunan.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemajuan masyarakat yang belum begitu berkembang, cendekiawan cenderung ditafsirkan sebagai kaum intelegensia atau kaum terpelajar yang menjadi tulang punggung dari kelompok kelas menengah. Masih sedikitnya lapisan terpelajar, membuat kelompok ini merupakan bagian elite dari kelas menengah saat ini. Brantlinger menyebut kaum intelektual sebagai kaum terpelajar mempunyai pengaruh ideologis menempatkan mereka pada struktur sosial ekonomi

¹ Patrick Barr-Melej, *Reforming Chile: Cultural Politics, Nationalism, and the Rise of the Middle Class*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 2001, hlm 2.

mapan dalam masyarakat.² Apalagi di daerah atau pedesaan, kaum intelektual ini dianggap memiliki *nation of superiority*, ciri-ciri keunggulan lebih dari kebanyakan yang lain. Karena itu mereka memiliki pengaruh besar dikalangan masyarakat Indonesia.

Kebanyakan golongan ini kritis terhadap lingkungannya dan mereka mampu mengalami transendensi berfikir melampaui kepentingan kelasnya. Kaum intelektual termasuk ulama, adalah mereka kaum intelegensia tradisional yang tampil untuk mewarisi misi para nabi dan filsuf.³ Dalam konteks masyarakat muslim, Salvatore dan Eickelman menjelaskan eksistensi ulama sebagai bagian dari kaum intelektual. Menurutnya masyarakat umumnya memberikan ruang terhormat terkait dengan eksistensi maupun peran ulama dalam berbagai aktifitas sosial dan keagamaan. Meskipun terjadi perkembangan teknologi dan informasi, tidak membuat ulama kehilangan pengaruh karena mereka mampu beradaptasi dan membangun aliansi baru dalam struktur sosial umat muslim. Sehingga tak mengherankan pendekatan ulama kadangkala lebih efektif dibandingkan pendekatan birokratik pemerintahan dalam sebuah peristiwa konflik.⁴

Sementara itu dilihat dari sejarah pertumbuhannya, Jim Smyth mengemukakan bahwa eksistensi kelas menengah sangat terkait dengan tingkat pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi suatu masyarakat (*social wealthness and prosperity*).⁵ Senada dengan Smyth, Alexis de Tocqueville menjelaskan bahwa di

² Ellen Brantlinger, *Dividing Classes: How the Middle Class Negotiates and Rationalizes School Advantage*, Routledge Falmer 29 West 35th Street, New York-London, 2003, hlm 6.

³ Anonymous, *Kelas Menengah Adalah Upaya Membentuk Sebuah Masyarakat Madani*, Wordpress.com 23 oktober 2010, diakses tanggal 23 Februari 2015.

⁴ Armando Salvatore and Dale F. Eickelman, *Public Islam and the Common Good*, Koninklijke Brill NV, Leiden-Boston, The Netherlands, 2004, hlm 129.

⁵ Jim Smyth, *The Men of Property: Politics and the Language of Class in the 1790s*, dalam Flintan Lane (Editor), *Politics, Society and the Middle Class in Modern Ireland*, Palgrave Macmillan, London, UK, 2010, hlm 8.

zaman modern, dengan makin meningkatnya pendidikan dan tingkat pendapatan dalam masyarakat, terutama ketika terjadi ketidakpuasan pada berbagai lapisan masyarakat, maka timbul gejala demokrasi, yakni sebuah perkumpulan dan perhimpunan yang berpartisipasi dan bertindak sebagai lembaga pengimbang terhadap kekuatan negara.

Ada tiga macam peranan yang dilakukan oleh perkumpulan dan perhimpunan tersebut, yakni: *Pertama*, menyaring dan menyiarkan pendapat dan rumusan kepentingan agar didengar oleh pemerintah dan diketahui kalangan masyarakat umumnya. *Kedua*, menggairahkan dan menggerakkan upaya-upaya swadaya masyarakat daripada menggantungkan diri kepada prakarsa negara. *Ketiga*, menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan, menarik masyarakat untuk membentuk usaha bersama dalam membangkitkan tanggungjawab sosial yang lebih luas.

Maka perkumpulan dan asosiasi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “masyarakat madani” pada negara-negara muslim, yang kemudian diterjemahkan sebagai golongan kelas menengah (*middle class muslim*) dengan keunggulan dinamika dan kemandirian yang dimilikinya.⁶

Selanjutnya, terminologi kelas menengah muslim di Indonesia, meskipun kajiannya belum begitu kuat namun eksistensinya sudah diakui oleh para ahli, terutama pasca terjadinya reformasi 1998. Azyumardi Azra menyebutnya dengan istilah kelas menengah muslim, sedangkan Muslim Abdurrahman menyebutnya dengan istilah kelas menengah Islam, namun kedua istilah menunjukkan arti yang setara. Menurut Muslim Abdurrahman, kelas menengah Islam awalnya sangat terkait dengan Islamisasi yang terjadi pada kalangan kelas menengah sejak era Orde Baru dimana mereka diberikan

⁶ Anonymous, *Op.Cit.*

ruang untuk mencari identitas Islam yang diharapkan mampu menjadi pendamping eksistensi negara (pemerintah).

Meskipun dibutuhkan waktu yang agak panjang, kelas menengah muslim ini kemudian menjadi bagian dari gerakan perubahan dan demokratisasi yang peduli terhadap pentingnya distribusi sosial dan ekonomi. Terutama bagaimana melakukan intervensi dakwah agama yang lebih transformatif, yakni mengetengahkan nilai sosial pendidikan agama yang lebih dialektikal terhadap realitas sosial kontemporer. Sebagaimana diakui oleh Mooney, bahwa kelas menengah adalah sosok golongan yang penuh potensi, dan dari berbagai segi sosial, politik, maupun ekonomi memiliki kemampuan untuk “merubah dunia” yang dapat diandalkan menjadi lokomotif utama bagi terwujudnya perubahan sosial.⁷

Kelas menengah muslim Indonesia meskipun lahir dari proteksi dan koneksi kekuasaan Orde Baru, ternyata cukup mampu mendesain dirinya memiliki sikap otonom sebagaimana ciri khas kelas menengah, dan mampu menjalankan sikap oposisi terhadap negara dan pasar Orde Baru yang hegemonik dan monopolistik. Meskipun harus diakui sebagaimana Porter menjelaskan bahwa posisi kelas menengah muslim saat itu selalu dalam subordinasi manajemen kekuasaan Orde Baru yang tidak selamanya netral dari kepentingan negara. Oleh sebab itu pada periode pasca Orde Baru, kelas menengah muslim tampil kritis terhadap persoalan sosial yang dihadapi umat Islam termasuk menentang isu radikalisme dan proaktif melawan sikap intoleran terhadap kebebasan beragama. Kelas menengah muslim mampu menjadi partner negara dalam mewujudkan harmoni kehidupan sosial keagamaan sebelum dan setelah reformasi.⁸

⁷ Nan Mooney, *Keeping Up With Our Parents: the Decline of the Professional Middle Class*, Beacon Press, Boston, US, 2008, hlm viii.

⁸ Donal J. Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia*, Routledge Curzon, London and New York, 2002, hlm 37.

Berdirinya ICMI misalnya, sebagaimana dijelaskan Muslim Abdurrahman, turut mengundang penilaian dari pengamat seperti Hefner (1993) dan Nakamura (1993) yang menjelaskan, bahwa itulah gejala munculnya watak Islam yang lebih inklusif, toleran, dan terbuka yang merepresentasikan bangunan dan karakteristik kelas menengah muslim yang lebih saleh secara sosial.⁹

Sementara itu selain persoalan kelas menengah tersebut di atas, hal yang tak kalah fenomenalnya adalah tumbuhnya benih-benih radikalisme keagamaan yang turut mewarnai dinamika politik nasional. Nur Syam misalnya menjelaskan bahwa semenjak reformasi bergulir yang ditandai dengan semangat demokratisasi, telah muncul keinginan untuk menjadikan agama sebagai dasar negara yang disertai dengan maraknya paham radikal. Gelombang gerakan ini memang tidak terlepas dari situasi politik pasca reformasi.

Setidaknya sejak 2001 hingga 2010 berbagai gerakan pro syari'at muncul, seperti penerapan syariah Islam di Nangroe Aceh Darusalam, lalu muncul berbagai Perda syariat yang intinya adalah penerapan syariah Islam untuk mengatur masyarakat. Di antaranya adalah di Tangerang, Sumatera Barat, Cianjur, Solok, Padang Pariaman, Padang, Enrekang, sampai yang paling fenomenal adalah Ranperda berbasis Injil di Manokwari. Munculnya Perda-Perda tersebut pada masa awal reformasi berkorelasi dengan suburnya berbagai gagasan praksis mengenai penerapan syariah secara kaffah dan keinginan untuk membangkitkan dan mendirikan khilafah Islamiyah dalam negara yang diindikasikan belum Islami.¹⁰

⁹ Moeslim Abdurrahman, *Kelas Menengah Islam dan Multikulturalisme*, www.lkassurabaya.blogspot.com, 10 Agustus 2007, diakses tanggal 23 Februari 2015.

¹⁰ Nur Syam, *Mewaspada Ideologisasi Agama*, www.lkassurabaya.blogspot.com, 10 Agustus 2007, diakses tanggal 23 Februari 2015.

Nampak bahwa gerakan keagamaan yang mengusung ideologi agama sudah menjadi realitas politik empiris era reformasi. Sistem cell yang dikembangkan oleh gerakan ini telah memasuki ruang-ruang di dalam berbagai golongan masyarakat. Akibatnya terjadi polarisasi di antara umat beragama khususnya umat Islam. Menurut Rabasa, radikalisme terutama disebabkan oleh militansi keagamaan yang tidak didasari oleh semangat mentoleransi perbedaan paham keagamaan pihak lain dan *truth claimed* yang berlebihan kerap menjadikan kaum radikal terjebak di dalam kubangan membenaran diri sendiri secara berlebihan.¹¹ Gambaran semacam itu setidaknya masih berlangsung sampai saat ini.

Sementara itu, menurut Fajar Riza Ul Haq sebagaimana dikutip oleh Nur Syam, meningkatnya eskalasi kekerasan bernuansa agama utamanya disebabkan oleh sikap keberagaman yang eksklusif yang tumbuh bersamaan dengan semangat primordialisme dan golongan. Menurutnya fenomena pendalaman Islamisasi (radikalisme) berkorelasi dengan menguatnya gejala konflik sektarian. Pendapat ini dikuatkan dengan dua alasan: *Pertama*, terjadi perebutan otoritas atas tafsir ajaran agama (Islam) yang kian terbuka dan keras di antara kelompok / organisasi Islam, sebagai contohnya adalah penyerangan dan pengrusakan terhadap fasilitas agama milik Ahmadiyah.

Kedua, model pemahaman Salafisme dan Wahabisme dari jalur penyebaran Timur Tengah tumbuh subur berproduksi di intitusi-institusi keagamaan dalam negeri. Kedua ideologi ini dikenal menolak prinsip-prinsip politik kewargaan yang menjadi fondasi bagi sebuah negara demokrasi. Arus baru inilah yang menggeser corak Islamisasi akar rumput yang sebelumnya diarsiteki oleh NU dan Muhammadiyah.¹²

¹¹ Angel Rabasa (et al.), *Deradicalizing Islamist Extremists*, National Security Research Division, Pittsburgh, 2010 hlm 27.

¹² I Ketut Widnya, *Mencari Penyelesaian Konflik Keagamaan di Indonesia: Sebuah Refleksi Dari Pengalaman Sejarah Hindu*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Menata Keragaman

Mencermati terhadap berbagai corak konflik tersebut, Nur Syam dengan mengutip konsepsi Ralf Dahrendorf (1994) tentang konflik mencoba mencari benang merah yang cukup relevan untuk digunakan sebagai alat elaborasi permasalahan radikalisme keagamaan. Menurutnya dengan mengutip Dahrendorf, konflik dalam tataran masyarakat apa pun lebih banyak difasilitasi oleh otoritas atau kewenangan. Konflik bukan disebabkan oleh disparitas sosial, kelas dan majikan, akan tetapi oleh kewenangan siapa atas apa, atau otoritas siapa kepada siapa. Islam sebagaimana dipahami oleh kaum pergerakan ideologisasi Islam adalah Islam dalam coraknya yang sangat tekstual.

Sedangkan dalam memandang sistem pemerintahan, kaum radikal memandang bahwa Islam yang benar adalah yang menerapkan praktek khilafah Islamiyah. Sistem demokrasi sebagaimana yang diterapkan oleh banyak negara tidak *compatible* dengan sistem khilafah yang sudah teruji di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi, dalam banyak hal, sistem pemerintahan tersebut tidak akan dapat menjamin terlaksananya syariah Islam secara kaffah.¹³

Selain persoalan radikalisme, kelas menengah muslim Indonesia juga dihadapkan dengan persoalan meningkatnya sikap intoleransi dalam kehidupan sosial-kultural keagamaan dalam masyarakat. Sikap intoleransi adalah jalan menuju pelanggaran hak orang lain dan pintu terjadinya konflik yang lebih besar. Intoleransi pada awalnya dan kemudian seringkali berujung pada kekerasan fisik. Simon Wiesenthal korban selamat pembantaian Nazi Jerman menjelaskan “genosida tak dimulai dari kamar gas beracun, namun ia dimulai dengan kata-kata”.

Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia” Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012, hlm 3.

¹³ Nur Syam, *Op.Cit.*

Dengan mengatakan itu, ia ingin menekankan bahwa sikap intoleransi semestinya dipahami sebagai rangkaian atau proses penyebaran ide, kata-kata, dan aksi-aksi bernuansa kebencian terkait praktek kekerasan. Intoleransi juga sebagai sumbu lahirnya ledakan konflik kemanusiaan. Singkatnya, intoleransi adalah bentuk dari kekerasan itu sendiri (Carrigan dan Nell; 2010).¹⁴

Dalam banyak kasus, tingginya angka intoleransi berbanding lurus dengan kasus-kasus pelanggaran. Menurut Alamsyah, pelanggaran tidak berdiri sendiri, selalu dimulai dengan prakondisi berupa tindakan intoleransi seperti penyesatan, intimidasi, dan lain-lain. Ia kemudian memberikan contoh nyata dari fenomena ini adalah tingginya kasus / tindakan intoleransi di Jawa Tengah dan DKI Jakarta pada tahun 2012 selalu berbanding lurus dengan kasus-kasus pelanggaran.¹⁵

Sebaliknya kehati-hatian dan kesadaran menghindar dari segala bentuk intoleransi seyogyanya menjadi *concern* dan perhatian para pejabat publik, ormas-ormas keagamaan, kalangan agama yang moderat, lembaga pendidikan, dan media massa. Meskipun masih sering dijumpai misalnya pernyataan pejabat publik yang bisa dikategorika sebagai *condoning violence* (merestui kekerasan). Alamsyah menengarai bahwa media massa juga kerap tidak sensitif dalam meliput isu-isu keagamaan dan dalam memilih diksi yang tepat. Masih banyak media menulis “aliran sesat” tanpa menyematkan kata “terduga” atau menulis kasus penyerangan dengan “bentrok”.

Para tokoh keagamaan yang moderat juga harus terus mengembangkan nilai moderatisme yang bersumber pada tradisi lokal dan prinsip universal keagamaan. Lebih

¹⁴ Alamsyah M. Dja'far, *Peta Suram Kebebasan Beragama dan Intoleransi di Indonesia*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia” Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012, hlm 10-11.

¹⁵ Baca juga Ismail Hasani, *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara Dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*, (*Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008*), Setara Institute, Jakarta, 2009, hlm viii-x.

dari itu perjumpaan dan dialog di antara mereka yang berbeda, terutama kelompok-kelompok minoritas sangatlah penting dilakukan. Dalam hal ini, fatwa-fatwa sesat oleh lembaga seperti MUI juga mesti dikaji ulang ketepatannya.

Sementara itu, pendidikan dinilai sebagai cara strategis jangka panjang dalam mengatasi problem kekerasan dan intoleransi ini. Karena itu, lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal harus bisa mencetak generasi yang toleran, bukan sebaliknya. Hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), misalnya pada tahun 2011, survei terhadap guru dan siswa di Jabodetabek, hasil penelitian menyebutkan sekolah-sekolah umumnya menjadi lahan subur penyebaran ideologi intoleran. Survei yang dilakukan di 100 sekolah menengah di Jakarta dan sekitarnya menunjukkan hampir 50 % pelajar mendukung cara-cara keras dalam menghadapi masalah moralitas dan konflik keagamaan.¹⁶

Itulah rangkaian kondisi empiris sekaligus tantangan yang dihadapi oleh kelompok kelas menengah muslim pasca terjadinya reformasi. Kelompok kelas menengah muslim yang sebagian terdiri dari barisan cendekiawan dan para ulama, beranggapan bahwa ideologi agama nampak telah diusahkan menjelma menjadi ideologi yang nyata di dalam sistem kenegaraan. Meskipun pengalaman sejarah membuktikan bahwa di dalam masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia, hegemoni atas nama apapun hanya akan menambah masalah.

Dengan demikian, aksi dan reaksi yang diciptakan oleh kelas menengah muslim dalam menghadapi diskursus atau keinginan memformalkan ajaran agama dalam kehidupan negara hakikatnya adalah wujud kewaspadaan dan bentuk perlawanan secara sadar yang mereka kedepankan. Sehingga dapat dipastikan resistensi akan selalu

¹⁶ *Ibid.*

muncul, dan kelas menengah muslim adalah kelompok utama yang memberikan resistensi tersebut dalam bentuk perlawanan terhadap sikap intoleran dalam mewujudkan kebebasan beragama dan penolakan terhadap paham radikalisme.

B. MASALAH PENELITIAN

Dari rangkaian pemaparan yang telah dilakukan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran kelas menengah Islam dalam dalam menghadapi ancaman radikalisme pasca reformasi?
2. Bagaimanakah peran kelas menengah Islam dalam dalam mewujudkan toleransi beragama pasca reformasi?
3. Bagaimanakah kebijakan negara dalam menghadapi ancaman radikalisme dan mewujudkan toleransi beragama pasca reformasi?

C. BATASAN MASALAH

Penetapan lingkup permasalahan atau pembatasan masalah penelitian dimaksudkan demi tercapainya efektifitas pembahasan dalam penelitian ini dan agar permasalahan tidak melebar, sehingga dapat membantu peneliti terhindar dari efek bias dalam proses interpretasi dan analisis data kelak, maka dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian khususnya yang menyangkut dengan fokus dan konteks penelitian ini. Dalam penelitian ini kategori daripada kelas menengah Islam hanya akan dikonsentrasikan pengkajiannya terhadap peran kaum intelektual Islam baik intelektual modern (cendekiawan, akademisi kampus, dan para guru di sekolah) maupun mereka yang dikategorikan sebagai intelektual tradisional (para ulama dan kiyai pesantren).

Sedangkan peran yang dimaksud adalah aksi dan reaksi yang diciptakan oleh kaum intelektual Islam sebagai wujud pemaknaan mereka terhadap realitas empiris ditujukan untuk menghadapi ancaman radikalisme dan mewujudkan toleransi beragama pasca reformasi yaitu periode 1998-2014. Sehingga pada akhirnya keharusan memahami kebijakan negara dalam menghadapi ancaman radikalisme dan upaya mewujudkan toleransi beragama menjadi tidak terhindarkan dalam rangka untuk mengurai konteks sosial politik yang mempengaruhi perilaku para cendekiawan dan ulama (kelas menengah Islam) di Indonesia.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Perkembangan kajian terkait kelas menengah Islam di Indonesia saat ini masih relatif dikesampingkan terutama bila dibandingkan dengan perkembangan kajian tentang kelas menengah secara umum yang telah begitu meluas. Secara akademik, permasalahan penelitian ini dipandang signifikan dalam mengembangkan pengkajian teoritis bagi mahasiswa, akademisi dan para peneliti yang *concern* terhadap perkembangan Islam dan politik khususnya tentang kelas menengah Islam, peran dan kontribusinya bagi perwujudan toleransi beragama dan menghadapi ancaman radikalisme yang makin marak dewasa ini.

Sedangkan secara praktis dalam kehidupan sosial masyarakat, permasalahan penelitian ini dapat menjadi sumber alternatif yang mencerahkan masyarakat di tengah kecenderungan berkembangnya persepsi bahwa pertumbuhan radikalisme dan perlawanan terhadap kebebasan beragama, mayoritas justru berasal dari internal umat Islam itu sendiri. Aksi radikalisme atas nama agama dan aksi penganiayaan terhadap penganut keyakinan agama tertentu sering mendeskreditkan institusi agama Islam sebagai sumber pelaku, padahal sesungguhnya masyarakat Islam pada umumnya

menolak anggapan semacam itu, apalagi bahwa lapisan masyarakat muslim khususnya kelas menengah Islam sebagai masyarakat tercerahkan (*enlightened society*) secara proaktif telah lama terlibat dalam mewujudkan toleransi berkeyakinan dan penolakan terhadap radikalisme.

Oleh karena itu, studi tentang kelas menengah Islam dan perannya dalam mewujudkan toleransi berkeyakinan dan penolakan paham radikalisme adalah bentuk epistemologi sosial masyarakat muslim yang sangat penting dalam rangka memaknai dan merespon dinamika sosial dan politik pasca reformasi, dan kemudian menjadi sangat penting untuk dikembangkan di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam saat ini, dalam rangka memperkaya kajian pemikiran politik Islam di Indonesia.

E. KAJIAN RISET SEBELUMNYA

Penelitian yang pernah dilakukan dengan tema kelas menengah Islam, radikalisme agama, maupun yang berkaitan dengan toleransi beragama di Indonesia di antaranya pernah dilakukan oleh Testriono, mahasiswa Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Judul penelitiannya adalah "Potret Santri Kelas Menengah Masa Orde Baru: Kunto Wijoyo dan Pandangannya Tentang Islam Indonesia". Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana Kunto Wijoyo muncul dan menjadi bagian dari kelas menengah santri di masa Orde Baru.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah sosial intelektual, yakni dengan melihat sejarah suatu golongan sosial serta konteks sejarah tumbuhnya seorang intelektual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelas menengah santri yang tumbuh di masa Orde Baru merupakan bagian dari kelas menengah baru atau borjuis kecil baru, yang terdiri dari

para pekerja penerima upah tidak produktif, termasuk di dalamnya para pegawai negeri, kaum intelektual, mahasiswa, dan kelompok profesional, pegawai swasta dan lain-lain. Sementara kelas menengah santri yang menjadi bagian dari kelas menengah lama yang terdiri dari para produsen berskala kecil yang pada masa Orde Lama menjadi pendukung utama Islam politik (Partai Masyumi dan NU) posisinya semakin terdesak ketika Orde baru mulai mengembangkan kebijakan ekonomi pasar dan memberi peluang kepada modal asing.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan pertumbuhan radikalisme agama adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Tim Penelitian gabungan dari UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta dengan tema “Studi Gerakan Islam Transnasional dan Kaki Tangannya di Indonesia” pada tahun 2007 lalu. Penelitian ini dilakukan guna menemukan asal-usul ideologi dan pola gerakan kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia dan untuk mengetahui respon para aktifis gerakan tersebut terhadap isi-isu sosial politik dan keagamaan yang berkembang saat itu. Penelitian ini dilakukan terhadap berbagai organisasi Islam yang dianggap radikal dan para aktifis gerakan Islam, dengan mengambil sebanyak 591 responden, pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth Interview*). Penelitian dilakukan di 24 daerah kabupaten / kota yang tersebar di 17 propinsi di seluruh Indonesia.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pola dan strategi utama gerakan Islam transnasional dalam membuat umat Islam menjadi keras dan radikal adalah dengan membentuk dan mendukung kelompok-kelompok lokal sebagai kaki tangan atau agen penyebar ideologi mereka. Mereka berusaha meminggirkan bentuk-bentuk pengamalan Islam yang lebih toleran yang telah lebih dahulu ada dan dominan ditengah-tengah masyarakat. Mereka juga aktif melakukan infiltrasi terhadap berbagai organisasi

pemerintah, dan organisasi Islam moderat dengan cara menyusupkan kader-kader mereka yang militan ke dalam kepengurusan organisasi tersebut.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan Islam dan toleransi beragama adalah penelitian yang dilakukan lembaga studi Center of Strategic and International Studies (CSIS) dengan tema "Tingkat Toleransi Beragama Masyarakat Indonesia". Lembaga ini melakukan survei pada Februari 2012 di 23 provinsi Indonesia. Dari 23 provinsi tersebut ada 2.213 responden. Survei dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan toleransi beragama.

Hasilnya, sebanyak 59,5 persen responden tidak keberatan bertetangga dengan orang yang beda agama. Sedangkan 33,7 persen lainnya memilih menolak tetangga yang beda agama dengan mereka. Kemudian survei beralih ke pertanyaan soal pembangunan rumah ibadah agama lain di sekitar lingkungan mereka. Sebanyak 68,2 persen responden memilih menolak pembangunan tersebut. Sementara 22,1 persen lainnya mengaku tidak keberatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kurangnya toleransi bisa dilihat dari penolakan pembangunan tempat ibadah. Mayoritas orang Indonesia bisa menerima tetangga yang beda agama, namun tidak bisa menerima jika ada pembangunan tempat ibadah agama lain di sekitar lingkungannya.

Selanjutnya ada beberapa lagi penelitian lain yang berkaitan dengan radikalisme agama dan toleransi beragama diantaranya adalah; "Toleransi Antar Umat Beragama: Studi Kasus Umat Islam dan Hindu di Kampung Lebah Kabupaten Klungkung Bali", adalah tesis dari Nurhayati tahun 2007. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan studi kasus di Kampung Lebah Kabupaten Klungkung-Bali. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini akhirnya diketahui bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama khususnya Islam dan Hindu berupa toleransi dalam hal suka dan duka, toleransi pada saat hari raya, serta toleransi generasi muda dalam pergaulan. Adapun faktor-faktor pendukung adanya toleransi yaitu, adanya sistem kekerabatan antara umat Islam dan Hindu, adanya ajaran dalam agama Hindu yang menguatkan mereka untuk bersikap toleransi, dan adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan antara umat Islam dan Hindu.

Sementara penelitian oleh Muhammad Luthfi, mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo tahun 2012 berjudul "Model Toleransi Beragama Nabi Muhammad SAW di Madinah" penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat terlihat bahwa model toleransi antar umat beragama yang pernah di lakukan oleh Nabi di Madinah adalah model toleransi aktif-positif, yang tidak hanya membatasi toleransi pada wilayah menghargai dan menghormati saja, melainkan sudah merambah pada bentuk kerjasama.

Dari berbagai penelitian di atas, dapat ditemukan corak utama penelitian yang lebih menekankan pada aspek Islam yang bersifat fungsional struktural tanpa membedakan subjek dari umat Islam itu sendiri. Dengan pengertian bahwa alat analisis pada beberapa penelitian di atas lebih menitikberatkan pada pendekatan holistik Islam sebagai intitusi agama, bukan Islam sebagai fenomena sosial seperti yang hendak dilakukan oleh peneliti dalam penelitian "Peran Kelas Menengah Islam Dalam Menangkal Ancaman Radikalisme dan Mewujudkan Toleransi Beragama Pasca Reformasi".

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, *scop* dan *concept* tentang pemahaman peran kelas menengah Islam lebih banyak dipengaruhi dan dilatarbelakangi oleh

serangkaian fenomena radikalisme agama dan berkembangnya sikap intoleransi di kalangan penganut agama tertentu dengan melakukan penyerangan terhadap penganut kepercayaan berbeda.

Oleh sebab itu, penelitian tentang peran kelas menengah Islam dalam menangkal ancaman radikalisme dan mewujudkan toleransi beragama pasca reformasi ini mencoba menggunakan pendekatan teori kelas dari Mark dan Weber, pemahaman operasional (*setting operational*) penelitiannya lebih difokuskan pada peran kelas menengah Islam dalam menangkal ancaman radikalisme dan mewujudkan sikap toleransi beragama pasca reformasi, serta bagaimana kebijakan negara terhadap masalah radikalisme agama dan toleransi beragama di Indonesia saat ini.

Secara umum, perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Peneliti	Penelitian	Lokasi	Subyek	Fokus
Testriono (2008)	“Potret Santri Kelas Menengah Masa Orde Baru: Kunto Wijoyo dan Pandangannya Tentang Islam Indonesia”	Library Research	Library Research	Mengetahui bagaimana Kuntowijoyo muncul dan menjadi bagian dari kelas menengah santri di masa Orde Baru.
Tim Penelitian UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta (2007)	“Studi Gerakan Islam Transnasional dan Kaki Tangannya di Indonesia”	24 daerah kabupaten / kota di 17 propinsi seluruh Indonesia	Organisasi Islam radikal dan para aktifis gerakan Islam	Asal-usul ideologi dan pola gerakan kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia.
Center of Strategic and International Studies (2012)	”Tingkat Toleransi Beragama Masyarakat Indonesia”	23 Propinsi	Siswa SMA	Persepsi siswa terhadap pembangunan rumah ibadah agama lain
Nurhayati (2007)	“Toleransi Antar Umat Beragama: Studi Kasus Umat	Klungkung Bali	Umat Islam dan Umat Hindu	Bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama khususnya Islam dan

	Islam dan Hindu di Kampung Lebah Kabupaten Klungkung Bali”			Hindu berupa toleransi dalam hal suka dan duka, toleransi pada saat hari raya, serta toleransi generasi muda dalam pergaulan
Muhammad Luthfi (2012)	“Model Toleransi Beragama Nabi Muhammad SAW di Madinah”	Library Research	Library Research	Model toleransi antar umat beragama yang pernah di lakukan oleh Nabi di Madinah
Penelitian yang akan dilakukan tahun 2015	“Peran Kelas Menengah Islam Dalam Menangkal Ancaman Radikalisme dan Mewujudkan Toleransi Beragama Pasca Reformasi”	Library Research	Library Research	Peran kelas menengah Islam dalam menangkal ancaman radikalisme dan mewujudkan sikap toleransi beragama di Indonesia

F. KERANGKA TEORI

1. Konsep Kelas Menengah

Menurut Embong, secara partikular terminologi kelas menengah adalah sebuah konsep yang sangat mengakar dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Meskipun harus pula diakui bahwa kajian ini juga cukup eksklusif mengingat masih terdapat kesulitan untuk menentukan terminologi kelas yang sesungguhnya. Misalnya eksistensi kelas menengah baru (*the new middle class*) membuat penelitian tentang kelas menengah menjadi sangat kompleks. Selanjutnya menjadi semakin berat karena di antara ilmuwan sosial, kerap berbeda pendapat pada isu kelas. Perdebatan mereka tidak hanya pada perbedaan konsep kelas antara tradisi Marxian dan Weberian, tetapi juga antara para penganut paham yang menjunjung tinggi kelas atau stratifikasi sosial versus penganut paham

yang menganggap konsep kelas sebagai bagian yang tidak relevan untuk pemahaman sosiologis masyarakat kontemporer.¹⁷

Tak hanya sampai di situ, kritik kelas sebagai konsep dan sebagai alat analisis juga datang dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan postmodernis. Namun, para ilmuwan penganut teori kelas mempertahankan bahwa itu adalah konsep yang sangat berguna, dan analisis kelas memiliki masa depan yang sangat relevan dalam pertumbuhan masyarakat modern. Levine dan Fantasia (1991) misalnya menjelaskan bahwa analisis kelas harus 'direvitalisasi', mereka tidak hanya menganggap penting analisis kelas, tetapi juga menunjukkan relevansi yang berkelanjutan dalam penyelidikan ilmu-ilmu sosial, terutama dalam mencoba memahami faktor kemandirian dan kepemimpinan yang melekat pada kelas menengah dianggap sangat berguna dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dalam masyarakat maju serta masyarakat berkembang.¹⁸

Lantas bagaimana kaum neo-Marxis dan neo-Weberians merumuskan konsep kelas menengah saat ini. Wright, seorang neo-Marxis, berpendapat bahwa tradisi Marxis menekankan kepemilikan alat-alat produksi dan eksploitasi kelas, dan melihat kelas sebagai penentu utama konflik sosial dan perubahan sosial.¹⁹ Mengambil apa yang dia sebut posisi 'maximalist' di kelas, Wright (1991, 1999) menjelaskan masalah 'kelas menengah' dari perspektif Marxis. Baginya, kelas menengah memiliki keuntungan dari segi posisi sosial, kelas ini menempati lokasi di antara kaum borjuis dan kaum pekerja, oleh karena itu mereka memiliki otoritas dan berfungsi sebagai alat kaum borjuis untuk

¹⁷ Abdul Rahman Embong, *State-led Modernization and the New Middle Class in Malaysia*, Palgrave Macmillan, London, UK, 2002, hlm 7-9.

¹⁸ N.C. Fleming, *Leadership, the Middle Classes and Ulster Unionism Since the Late-Nineteenth Century*, dalam Flintan Lane (Editor), *Politics, Society and the Middle Class in Modern Ireland*, Palgrave Macmillan, London, UK, 2010, hlm 212.

¹⁹ Baca juga Andrew Hoberek, *The Twilight of the Middle Class*, Princeton University Press, Princeton New Jersey, 2005, hlm 33.

mengeksploitasi kaum pekerja. Namun di sisi lain, kelas menengah berada dalam posisi yang sama dengan pekerja yang propertyless karena juga tidak memiliki alat-alat produksi.

Dalam analisis selanjutnya, analogi dapat digunakan untuk menggambarkan kaum borjuis dengan negara dan kaum pekerja dengan masyarakat umum. Bila logika dan eksistensi kaum borjuis kemudian dipersandingkan dengan logika dan eksistensi negara sebagai organisasi kekuasaan masyarakat, maka tak pelak lagi kelas menengah mendapat keuntungan sebagai tangan kanan negara yang berfungsi menjembatani kepentingan dan agenda politik negara terhadap masyarakat luas (kaum pekerja). Kelas menengah tetaplah menjadi bagian integral dari masyarakat umum, karena ia membawa misi sipilisasi masyarakat (*civilising mission*), oleh karena itu ia memiliki keunggulan karena memiliki akses terhadap kedua sisi yang berbeda yaitu sisi negara dan sisi masyarakat.²⁰

Dengan demikian, harus dapat dipahami dalam konteks ini bahwa karakter politik kelas menengah sering nampak ambivalen atas berbagai isu yang terjadi. Dalam konsep kelas menengah, kesempatan hidup cenderung mengikuti tradisi Weberian, yang menitikberatkan klaim utamanya adalah bahwa orang-orang di kelas menengah harus mengontrol beberapa jenis sumber daya karena memiliki kualifikasi yang tinggi dan keterampilan yang diperlukan, sehingga secara signifikan meningkatkan kapasitas pasar mereka dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki sumber daya ini. Sehingga dapat dipertegas bahwa kelas menengah ini memiliki modal sosial yang kuat (*social capital*) dalam tatanan kehidupan kolektif masyarakat. Meskipun patut digarisbawahi bahwa konsep kelas menengah Weberian adalah dipandang sebagai

²⁰ Alison Twells, *The Civilising Mission and the English Middle Class 1792-1850*, Palgrave Macmillan, London, 2009, hlm 4.

kategori stratifikasi sosial dalam masyarakat pasar, namun demikian tidak menutup peluang untuk digunakan dalam konteks analisis sosial masyarakat secara luas.²¹

Kembali kepada penjelasan Embong sebelumnya, para sarjana seperti Goldthorpe (1980, 1982) dan Lockwood (1995) mengemukakan teori kelas menengah baru (*the new middle class*), mereka menjelaskan bahwa kelas menengah baru ini terdiri dari orang-orang dengan kualifikasi tinggi dan keterampilan mumpuni. Selanjutnya diakui bahwa anggota kelas menengah baru melalui kepemilikan aset yang relatif unggul serta budaya dan organisasi yang tertib, (sebuah kondisi yang tidak dimiliki oleh orang-orang dari kelas pekerja), menikmati posisi istimewa karena mereka memiliki kepercayaan dari majikan (negara), dan pada saat yang sama, mereka menikmati kekuasaan atas tenaga kerja. Fasilitas diberikan karena majikan mengakui bahwa anggota kelas menengah baru memiliki kapasitas pasar yang lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Baik penganut tradisi Marxis dan tradisi Weberian sama-sama mengakui pekerjaan sebagai ukuran kelas. Bahkan, pekerjaan adalah bahan dasar dari semua peta kelas (Edgell; 1993).²²

2. Kelas Menengah Islam di Indonesia

Analisis peran kelas menengah Islam mau tidak mau harus berangkat dari analisis politik, terutama yang terkait dengan struktur sosial-ekonomi dan munculnya grup-grup politik sehingga muncul kaum menengah intelektual. Menurut Azyumardi Azra, seorang pakar Islam Indonesia mengemukakan bahwa pembicaraan publik tentang 'kelas menengah' Indonesia baru meningkat menjelang akhir 2011. Dalam berbagai diskusi dan pemberitaan media terungkap, jumlah kelas menengah Indonesia terus

²¹ Stephen J. Ball, *Class Strategies and the Education Market: the Middle Classes and Social Advantage*, Routledge Falmer, London and New York, 2003, hlm 79.

²² *Ibid.*

meningkat dalam periode tersebut. Jumlah mereka kini diperkirakan atau bahkan lebih dari separuh jumlah total penduduk Indonesia-sekitar 130-140 juta orang.

Selanjutnya apa ukuran seseorang atau satu keluarga tertentu termasuk kelas menengah (*middle class*)? Secara sederhana, ukurannya adalah perbelanjaan per kapita sekitar 5-20 dolar AS (Rp 45 ribu-1,8 juta) per hari. Sebaliknya, mereka dengan pendapatan kurang dari jumlah itu, apalagi cuma dua dolar per hari, termasuk kelas bawah (*lower class*), bahkan miskin. Namun menurut Azra, ada juga dalam ukuran lain, sebuah keluarga disebut termasuk kelas menengah jika memiliki gelar sarjana, pekerjaan tetap (apakah ayah atau ibu atau kedua-duanya) dengan pemasukan tetap, rumah dan kendaraan (meski secara cicilan), serta sejumlah tabungan. Ukuran tambahan lain; mampu membiayai liburan dengan segenap anggota keluarga minimal sekali dalam setahun.

Kemudian Azra menjelaskan bahwa pertumbuhan kelas menengah Indonesia tidak terlepas dari peningkatan jumlah kelas menengah Muslim negeri ini. Hal ini juga sebangun dengan pembicaraan tentang kelas bawah dan miskin di negeri ini, yang hampir bisa dipastikan pula sebagian besarnya adalah kaum Muslim, karena 'takdir' demografis Indonesia, yang sekitar 88,2 persen penduduknya beragama Islam.

Pertumbuhan kelas menengah Muslim bermula dengan tersedianya pendidikan-khususnya pendidikan tinggi agama Islam (PTAI). Inilah salah satu buah kemerdekaan karena sepanjang masa penjajahan Belanda sampai dasawarsa pertama kemerdekaan, terdapat hanya dua pendidikan tinggi di negeri ini; sekolah tinggi teknik (yang kemudian menjadi ITB) di Bandung dan STOVIA (Sekolah Tinggi Kedokteran yang kemudian menjadi UI) di Jakarta.

Berkat kemerdekaan, sejak akhir 1950-an terjadi ekspansi kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak bangsa pada berbagai tingkatannya. Pada tingkat pendidikan tinggi, di kalangan kaum Muslim ini ditandai berdirinya PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta, yang pada 1960 berubah menjadi IAIN. Sejak saat itu sampai awal 1970-an berdiri pula IAIN di berbagai ibu kota provinsi dengan fakultas-fakultas cabangnya (yang pada 1996 menjadi STAIN) di kota-kota tingkat kabupaten.

Pada periode yang sama, perguruan tinggi umum (PTU) juga berdiri di hampir seluruh ibu kota provinsi. PTU-PTU ini juga memberikan akses lebih besar kepada putri-putri kaum Muslim untuk mempelajari bidang ilmu. Pada tingkat sarjana lengkap (Drs), PTU juga memberikan tempat bagi para sarjana muda (BA) lulusan IAIN untuk melanjutkan studinya. Hasil ekspansi pendidikan tinggi yang berlangsung sejak akhir 1960-an sampai sekarang, terjadilah apa yang disebut almarhum Nurcholish Madjid sebagai 'panen sarjana' kaum Muslimin Indonesia.²³ Jumlah sarjana muda (BA) dan sarjana lengkap (Drs/Dra), apakah lulusan PTAI ataupun PTU (baik negeri maupun swasta), selalu bertambah dalam jumlah berlipat ganda dari tahun ke tahun. Dan mereka inilah yang kemudian dikenal dengan golongan kelas menengah Islam, mampu memunculkan berbagai perkembangan yang tidak pernah terbayangkan pada masa sebelumnya.²⁴

Sementara menurut Saratri Wilonoyudho, menjelaskan bahwa sejarah panjang Indonesia sampai saat ini belum memiliki kelas menengah yang kuat. Melacak lewat sejarah masa lalu nampak bahwa kelahiran kelas menengah di jaman kolonial seperti *Sarekat Islam*, *Indiche Partij*, *Sarekat Dagang Islam*, *NU*, *Muhammadiyah* dan

²³ Baca juga Julie Chernov Hwang, *Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki*, Freedom Institute, Jakarta, 2011, hlm 69.

²⁴ Azyumardi Azra, *Kelas Menengah Muslim Indonesia*, Harian Republika, Kamis 29 Desember 2012.

sebagainya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor di antaranya lahirnya diskriminasi dan tekanan kaum penjajah Belanda atas masyarakat pribumi saat itu.

Menurut Wilonoyudho, pengertian kelas menengah di Indonesia memang bukan berakar pada pengertian kelas menengah Eropa Barat sebagai penggerak kapitalisme akibat Revolusi Industri. Kelas menengah Indonesia lahir dari tekanan politik, dan mereka hanya dapat didefinisikan terdiri dari para intelektual, kaum pedagang, ulama, dan kelompok profesional lainnya.

Bersamaan munculnya ideologi lain yang berkembang saat itu seperti liberalisme, Marxisme, sosialisme dan Islam modern, kelas menengah saat itu terus berkembang dari organisasi sosial menjadi organisasi politik dan tumbuh kesadaran untuk melepaskan diri menjadi bangsa yang merdeka. Nampak bahwa mereka masih memiliki idealisme yang cukup bisa diharapkan, karena mereka memiliki musuh yang jelas, yakni kaum penjajah.

Namun selepas penjajahan, kelas menengah Indonesia justru mengalami reduksi, karena mereka hanyalah kelas menengah semu, dan kaum sipil Islam adalah salah satu bagian dari golongan kelas menengah Indonesia.²⁵ Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Kolonial Belanda melahirkan kelas menengah karbitan. Terlebih pelibatan diri Indonesia pada kapitalisme global sejak tahun 1967, menempatkan negeri ini berada dalam genggamannya *kapitalisme inti* dan kita hanya ada di *kapitalisme pinggiran*. Artinya meskipun modal, keahlian, pengetahuan, dan buruh juga memegang peranan penting untuk mengeksploitasi sumberdaya alam untuk menjadi barang produksi, namun keuntungan dan modal disedot habis-habisan ke pusat kapitalisme inti, yakni negara-negara industri maju.

²⁵ Julie Chernov Hwang, *Op.Cit*, hlm 77-81.

Mulai saat itu muncul pula istilah kelas menengah birokrat, terutama akibat Dwi Fungsi ABRI, dan mengantarkan anggota ABRI untuk menguasai seluruh posisi strategis, mulai dari pemerintahan (Lurah, Bupati, Gubernur, Sekjen, Dirjen, Menteri) sampai memimpin di berbagai BUMN penting.

Singkat kata, kelas menengah yang muncul adalah kelas menengah semu karena lahir dari "karbitan" dan produk kapitalis semu pula (*pseudo capitalism*). Mereka bukan penggerak utama pembaruan dan demokrasi, namun hanya karena keturunan, penunjukkan dan *lobby-lobby* penting lainnya. Puncak kekecewaan umat Islam adalah kelas menengah (Islam) juga produk Orde Baru, yakni ICMI, dan tidak memiliki peran yang berarti.²⁶

3. Teori Hubungan Agama dan Negara

Menurut Nur Syam, dalam khasanah pemikiran Islam klasik, hubungan agama dan negara ditipologikan menjadi tiga hal, yaitu: *Pertama*, pemikiran al-Maududi dan Hasan al-Banna tentang hubungan agama dan negara yang *integrated*. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Agama sebagai sebuah aturan sudah memuat seluruh persoalan kehidupan manusia, termasuk mengatur negara. Yang dilakukan oleh Nabi sudah final. Nabi Muhammad adalah rasul dan pemimpin negara sekaligus.

Kedua, pemikiran al-Mawardi dan al-Ghazali tentang hubungan agama dan negara yang bercorak simbiotik mutualistik, artinya agama dan negara saling membutuhkan. Agama perlu landasan etik untuk mengatur masyarakat dan agama membutuhkan negara sebagai tempat untuk mengembangkannya. Ketiga, pemikiran Thaha Hussein tentang hubungan agama dan negara yang bercorak sekular. Agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda. Ada wilayah agama dan ada wilayah negara.

²⁶ Saratri Wilonoyudho, *Kelas Menengah Islam, Di Mana Kau?* Wordpress.com 25 Januari 2013

Dalam banyak hal, Indonesia dianggap menganut paham kedua, yaitu hubungan antara agama dan negara yang bercorak simbiotik-mutualistik. Tidak kurang misalnya Dien Syamsudin (1994) juga menyatakan bahwa pilihan Indonesia untuk menentukan corak hubungan agama dan negara seperti itu sangat tepat. Mengingat bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Seperti pernyataan KHA Wahab Hasbullah bahwa hubungan antara negara dan agama itu seperti gula dan manisnya (Adam Schwarz, 1994). Dalam praktik, hubungan agama dan negara itu seperti satu coin mata uang. Di satu sisi agama dan di sisi lain negara. Sebuah corak hubungan yang melebur. Menjadi substansial, bukan saling mengatasi.

Model pemikiran tersebut, selama ini dikembangkan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU dalam percaturan kenegaraan di Indonesia. Makanya, hampir tidak pernah dijumpai arus konfrontatif antara keduanya dengan negara di sisi lain. Corak pemikiran dari organisasi khas Indonesia ini memang sangat kontekstual. Artinya, memang menggunakan tolok ukur "lokalitas" dalam memahami hubungan antara masyarakat, agama dan negara. Semenjak kemerdekaan hingga sekarang, corak pemikiran inilah yang dominan di kalangan orang NU yang berbasis pondok pesantren dan orang Muhammadiyah yang berbasis sekolahan.²⁷

Perubahan pun terus berlangsung. Ketika orang NU mengenal sekolahan dan demikian pula orang Muhammadiyah, maka penerapan konsep relasi agama dan negara tampaknya tetap tidak berubah. Ini menandakan, ada kedewasaan pemikiran keagamaan di antara keduanya. Bahkan ketika orang NU banyak sekolah ke Timur Tengah dan demikian pula orang Muhammadiyah, maka ketika kembali ke pangkuan organisasinya, maka corak pemikiran agama Timur Tengah pun disaringnya. Tidak ingin

²⁷ Baca juga Luthfi Assyauckanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Freedom Institute, Jakarta, 2011, hlm 4-7.

ditransplantasikan apa adanya. Sikap fundamental Timur Tengah pun dieliminasi sedemikian rupa.

Sikap kedewasaan beragama seperti ini telah teruji selama 62 tahun, semenjak kemerdekaan, 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Masyarakat beragama di Indonesia telah mempraktikkan hubungan agama dan negara yang substansial. Hampir seluruh organisasi sosial keagamaan yang bercorak khas Indonesia, yang mengusung Islam substansial, bersepakat untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia dengan Pancasila dan NKRI-nya.

Dewasa ini sedang bergerak dengan cepat perubahan sosial yang digerakkan oleh mesin ideologi agama. Ketika agama diideologikan, maka ketika itu telah terjadi proses formalisasi agama dalam tataran praksis, sehingga akan berakibat pada proses resistensi kelompok lain yang merasa berada di luarnya. Formalisasi agama dalam kehidupan negara pasti akan memunculkan resistensi. Makanya tidak salah jika di kemudian hari akan muncul perda berbasis agama-agama, di mana agama tertentu menjadi mayoritas.²⁸

4. Konsep Radikalisme Agama

Menurut Sulistyio dalam *Radikalisme Keagamaan dan Terorisme*, radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Makna radikalisme dalam sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut paham/aliran

²⁸ Nur Syam, *Op.Cit.*

tersebut menggunakan kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan diyakininya.

Proses yang terjadi dalam radikalisme adalah radikalisasi, yang didefinisikan sebagai proses personal di mana individu mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, sosial, atau agama secara ekstrim, dimana dalam pencapaian tujuannya membenarkan penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu, sehingga mempersiapkan dan memotivasi seseorang untuk mencapai perilaku kekerasan.²⁹ Terbentuknya radikalisme dicapai melalui proses radikalisasi, dimana terdapat 5 (lima) aspek yang memiliki peranan penting selama proses tersebut berlangsung, yaitu:

Pertama, proses individu. Radikalisasi dipandang sebagai salah satu proses pencarian identitas bagi individu (anak muda pada umumnya). Bagi anak muda, pencarian identitas merupakan bagian dari proses mendefinisikan hubungan seseorang dengan dunia. Dinamika interpersonal memerlukan interaksi interpersonal dengan aktor-aktor lain untuk merangsang dan mempengaruhi proses pemahaman/pemikiran individu yang menjadi target radikalisme.

Kedua, pengaruh lingkungan. Narasi dan kosa kata politik organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh besar di lingkungan masyarakat dapat menjadi masukan narasi bagi kelompok-kelompok radikal. Beberapa faktor sosial menjadi pemicu radikalisme dimana pada eskalasi tertentu dapat menjadi sebuah gerakan radikal, antara lain : faktor sosial-politik. Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial-politik daripada gejala keagamaan, dalam hal ini kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa kelompok yang memiliki pemahaman agama yang sama dengan mereka tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap

²⁹ Barry Rubin (Editor), *Guide to Islamist Movements (volume 1)*, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England, 2010, hlm xiii.

kekuatan yang mendominasi. Kaum radikal mencoba menyentuh sentimen dan emosi keagamaan, serta menggugah kekuatan untuk mencapai tujuan politiknya melalui bahasa dan slogan-slogan agama.

Ketiga, faktor emosi keagamaan. Sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Pada konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif. Faktor kultural Masyarakat dikenal selalu berusaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan mereka. Contoh faktor kultural dalam radikalisme adalah pengaruh budaya sekularisme dunia barat terhadap kebudayaan Islam, yang dianggap oleh kelompok radikal Islam telah memarjinalkan ideologi dan kebudayaan mereka.

Keempat, faktor ideologis. Ketidakmampuan dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban, membuat kelompok radikal menempuh jalur kekerasan untuk menunjukkan keberadaan/hegemoni kebudayaan mereka. Contoh ideologi anti Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan bagi kelompok agama tertentu. *Kelima*, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan akibat dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Di samping itu, faktor media massa (pers) asing yang selalu memojokkan agama tertentu juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal.³⁰

³⁰ Baca juga Barry Rubin and Judith Colp Rubin, *Chronologies of Modern Terrorism*, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England, 2008, hlm 3.

Terdapat 2 (dua) tipe proses radikalisasi yang umum terjadi, *pertama* akibat krisis identitas yang diselesaikan dengan pemahaman keyakinan yang menyatakan kekerasan sebagai solusi, dimana umumnya berakar pada kekhawatiran tentang kondisi makro seperti integrasi, kebijakan luar negeri, perkembangan politik, budaya, dan ekonomi global. Sedangkan proses radikalisasi yang *kedua* dihasilkan dari dinamika interaksi sosial pada kondisi mikro yang dipengaruhi oleh media, teman sebaya, pemimpin, anggota keluarga, atau lingkungan sekitar, sehingga menerima sistem kepercayaan/pemahaman bahwa sesuatu dapat dan harus dilakukan untuk menghadapi hal-hal yang menjadi ancaman terhadap aliran kepercayaan atau pemahaman yang diyakininya.

Munculnya radikalisme keagamaan terjadi akibat hal-hal berikut : 1) Klaim kebenaran Pemeluk agama meyakini bahwa kitab suci mereka memang mengajarkan kebenaran monolitik (tunggal), dimana sering terdapat penafsiran yang menganggap bahwa agama lain adalah tidak benar. 2) Ketaatan "buta" terhadap pemimpin agama. Fanatisme berlebihan terhadap pemimpin agama, sehingga perkataan pemimpin agama "dianggap" sebagai kebenaran yang hakiki.³¹

Sementara menurut Haryatmoko, radikalisme tumbuh dari proses ideologisasi yang berlebihan terhadap keyakinan agama. Menurutnya agama memperteguh motivasi setiap pemeluknya. Alasannya: *Pertama*, agama memberi identitas karena akta pendirian suatu kelompok diaktualisasikan kembali dengan representasi diri. *Kedua*, agama menumbuhkan keyakinan bahwa orang berada dalam kontak dengan makna terdalam hidupnya. *Ketiga*, acuan ke tujuan terakhir memberi pembenaran dan mendasari sikap kritis terhadap tatanan yang ditolaknya (Ricoeur, 1986). Bahaya pada

³¹ Adi Sulisty, *Radikalisme: Keagamaan dan Terorisme*, wordpress.com, 12 Februari 2014.

semua agama ialah direduksi hanya menjadi ideologi. Dasar ideologi kekerasan adalah teror. Teror memberi pembenaran terhadap semua bentuk kejahatan atas nama ideologi.

Maka kesuksesan ideologi radikalisme adalah kemampuannya dalam memberi kepastian. Dalam ketidakpastian ekonomi global yang melahirkan pengangguran dan ketidakadilan, radikalisme agama menjanjikan ekonomi adil dan persaudaraan melalui revolusi moral. Dengan cara ini, radikalisme memberi identitas pasti. Bukan hanya memberi janji, namun menjamin, bukan atas dasar analisa namun melandaskan pada keyakinan. Keyakinan ini memberi kepastian. Lalu dari mana kepastian itu datang?

Kaum radikal memiliki keyakinan bahwa dunia hanya terdiri dari dua kelompok, yaitu baik dan jahat (agama pilihan dan musuh). Kepastian diberikan kepada pemeluk agama pilihan. Janji akan masa depan tanpa kesusahan dikaitkan dengan pemisahan baik dan jahat. Pemisahan ini berfungsi untuk setanisasi musuh. Pembunuhan musuh lantas dibenarkan karena musuh adalah negasi terhadap nilai-nilai agama pilihan.³² Maka tidak mungkin ada perdamaian dengan orang-orang bukan pemeluk agama pilihan.

Ramalan bahwa musuh agama pilihan akan binasa menjadi alat pembenaran untuk melakukan apa saja, termasuk kekerasan dan pembunuhan. Selanjutnya logika kekerasan yang memuncak pada pembunuhan mendasarkan diri pada tiga mekanisme: yaitu penunjukan kambing hitam, radikalisasi, dan pembunuhan. Hipotesisnya adalah krisis menciptakan situasi kondusif bagi tumbuhnya radikalisme agama.³³

³² Barry Rubin and Judith Colp Rubin, *Op.Cit.*

³³ Haryatmoko, *Agama-Agama dan Masalah Kekerasan: Proses dari Imajiner Sosial ke Kekerasan*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia" Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012, hlm 5.

5. Teori Demokratisasi

Transformasi ke arah demokrasi mengandung pengertian pergeseran dari suatu sistem nondemokratis (apa pun bentuknya) ke arah sistem yang demokratis. Namun dalam banyak pembahasan, transformasi ke arah demokrasi hampir selalu berkaitan dengan perubahan dari hubungan yang memiliki karakter *zero-sum*, dalam artian bahwa negara sangat kuat dan masyarakat sipil sangat lemah, menjadi hubungan yang berkarakter *positive-sum*.

Dengan pengertian seperti ini maka diperlukan strategi dan taktik untuk meningkatkan kekuatan masyarakat sipil sehingga memiliki *bargaining position* yang lebih kuat. Sementara itu, beberapa ahli menggunakan istilah *people empowering* (perberdayaan rakyat) untuk strategi dan taktik meningkatkan nilai tawar masyarakat. Pemberdayaan rakyat dilakukan melalui liberalisasi dan demokratisasi (O'Donnell, 1988).¹¹

Liberalisasi merupakan proses untuk mendefinisikan kembali, memperluas dan menjamin hak-hak individu dan kelompok-kelompok sosial dari kesewenang-wenangan dan tindakan-tindakan ilegal, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh pihak ketiga. Dalam tingkatan individu, jaminan-jaminan ini meliputi elemen-elemen klasik tradisi liberal seperti hak untuk diperiksa di depan pengadilan, hak untuk didampingi oleh pembela dalam suatu perkara pengadilan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, kebebasan untuk mengadakan suatu pergerakan, berbicara dan petisi serta sebagainya. Pada tingkatan kelompok, meliputi misalnya bebas dari hukuman untuk menyatakan ketidakpuasan kelompok terhadap kebijakan pemerintah, bebas dari

¹¹ Awan S. Dewanta dalam Riza Noer Arfani, "Demokrasi Indonesia Kontemporer", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 277-279.

penyensoran terhadap sarana-sarana komunikasi, serta kebebasan untuk berserikat secara sukarela dengan warga negara yang lain.

Sedangkan demokratisasi menunjuk pada proses untuk menerapkan aturan-aturan dan prosedur kewarganegaraan dan lembaga-lembaga politik. Sebelum proses tersebut, prinsip-prinsip pendukung (seperti pengawasan yang koersif, tradisi sosial, penilaian para ahli ataupun praktek-praktek administrasi) perlu dilakukan. Prinsip-prinsip pendukung tersebut diperluas hingga mencakup orang-orang yang belum memperoleh hak dan kewajiban semacam itu (misalnya warga negara yang tidak membayar pajak, yang buta huruf, etnis minoritas dan lain-lain), dan juga mencakup lembaga-lembaga yang belum memperoleh partisipasi warga negara (misalnya badan-badan militer, organisasi-organisasi partisan, asosiasi-asosiasi kepentingan, lembaga-lembaga pendidikan dan lain-lain).

Kedua proses ke arah demokratisasi tersebut mengasumsikan adanya polarisasi orientasi di tingkat negara (elit) dalam kaitannya dengan usaha untuk mempertahankan kekuasaan, maupun di tingkat masyarakat dalam kaitannya dengan cara-cara pencapaian demokrasi. Di tingkat negara, elit terpolarisasi menjadi dua kelompok yakni kelompok reformis yang menghendaki terjadinya pembukaan akses menuju kekuasaan dan kelompok garis keras yang menginginkan status quo. Sedangkan dalam tingkat masyarakat, polarisasi yang ada menghasilkan kelompok radikal yang menghendaki perubahan radikal kepada suatu sistem yang demokratis dan kelompok moderat yang meskipun menginginkan tetapi dengan cara yang normal.³⁴

³⁴ Baca juga Berna Turam, *Between Islam and the State: The Politics of Engagement*, Stanford University Press, Stanford, California, 2007, hlm 151.

6. Konsep Toleransi dan Intoleransi

Zuhairi Misrawi seorang intelektual muda Islam Indonesia, menilai bahwa kelompok-kelompok yang kerap menebarkan kebencian yang disertai dengan kekerasan selalu menggunakan paham keagamaan dan keyakinan untuk menjustifikasi tindakannya. Konsekuensinya, agama yang semestinya mengajak kepada keadilan dan kedamaian berubah menjadi instrumen yang ampuh untuk mengobarkan kebencian dan kekerasan.

Menurut Amartya Sen, dalam *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*, saat agama digunakan sebagai identitas soliter, maka di situlah agama menjelma sebagai energi bagi tumbuhnya kekerasan. Lihat misalnya, takbir atau kalimat Allahhu Akbar yang biasa diucapkan saat melakukan shalat untuk mengagungkan Tuhan justeru digunakan oleh sebagian kelompok untuk mengabsahkan kebencian dan kekerasan.

Fungsionalisasi simbol dan paham keagamaan sebagai pemantik intoleransi merupakan fakta yang mesti diwaspadai. Muhammad Arkoun dalam *al-Fikr al-Ushuly wa Istihalat al-Ta'shil* menggambarkan agama sebagai domain yang sakral dapat dijadikan sebagai alat untuk mensakralkan kekerasan. Hal tersebut terjadi tidak hanya dalam sejarah Islam, melainkan dalam sejarah agama-agama samawi dan non-samawi. Karenanya, menjauhkan agama dari fungsionalisasi dan politisasi kekerasan merupakan sebuah keniscayaan agar agama berperan bagi pencerahan umat dalam rangka menegakkan keadilan dan kedamaian.³⁵

Menurut Misrawi, intoleransi merupakan tindakan yang mengingkari hidup bersama dalam damai. Intoleransi menegasikan toleransi. Sebagai sebuah tindakan yang

³⁵ Zuhairi Misrawi, *Kontestasi Toleransi dan Intoleransi Bermuansa Agama*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bermuansa Keagamaan di Indonesia" Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012, hlm 2-4.

dapat mengganggu hidup rukun, intoleransi tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan sebuah perbuatan yang dibangun oleh gejala-gejala sosial yang secara terang-benderang telah mendorong tumbuhnya intoleransi.

Karuna Center for peacebuilding menggambarkan pola-pola yang menandakan tingkat intoleransi dalam sebuah masyarakat. *Pertama*, penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain (*restriction*). Dalam beberapa kasus, intoleransi dilakukan dalam bentuknya yang sangat halus, yaitu melalui kebijakan publik yang tidak memberikan akses yang sama terhadap kelompok minoritas, atau mereka yang diidentifikasi menyimpang. Fakta tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dapat menimbulkan trauma dan ketakutan, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan akses yang sama, karena dianggap sebagai “kelompok sesat”.

Kedua, pandangan dan sikap yang menganggap kelompok lain lebih rendah (*dehumanization*). Dehumanisasi menjadi salah satu bentuk intoleransi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan terhormat telah direndahkan akibat segregasi sosial yang dikonstruks oleh kelompok tertentu. Dehumanisasi terjadi karena ada pandangan hegemonik yang diciptakan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ketika demokrasi dipahami dalam koridor prosedural yang hanya memandang pentingnya kuantitas dan mengabaikan kualitas, kerap kali menjadikan demokrasi sebagai ancaman bagi toleransi. Konsekuensinya, dehumanisasi menjadi fakta yang tidak bisa terelakkan.

Ketiga, pengabaian hak-hak sipil, politik, dan ekonomi (*opression*). Opresi umumnya merupakan kelanjutan dari menggumpalnya restriksi dan dehumanisasi. Di masa lalu, rezim otoriter kerap kali melakukan tindakan yang mencederai hak-hak sipil, politik, dan ekonomi. Tetapi di dalam rezim yang dipilih secara demokratis pun, opresi

secara telanjang terjadi, karena pemerintah takut terhadap tekanan dari “kelompok mayoritas” dan kerap kali pencitraan dan kalkulasi politik menjadi pertimbangan utama. Dalam hal ini, intoleransi lahir akibat kelalaian negara, bahkan pembiaran negara dalam melindungi setiap warganya.

Keempat, penyerangan dan melakukan upaya pembunuhan (*act of aggression*). Penyerangan dan pembunuhan merupakan salah satu tindakan intoleran yang paling mengerikan, karena intoleransi telah menjelma menjadi tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Penyerangan dan pembunuhan terjadi umumnya karena lemahnya penegakan hukum dan berpihaknya negara terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan intoleransi sebagai ideologinya. Pada tahap ini, intoleransi merupakan ancaman yang sangat serius, karena mulai menciptakan rasa tidak aman bagi kelompok lain, terutama bagi para korban.

Kelima, pengorganisasian pembunuhan massal (*mass-violence*). Salah satu bentuk pembunuhan massal yang paling mengemuka dalam satu dasawarsa terakhir, yaitu terorisme. Dalam setiap tindakan terorisme, selalu ada korban yang berjatuh yang meninggalkan kecemasan, ketakutan, dan ketidakamanan. Terorisme dapat mengancam, baik negara maju seperti Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa, maupun negara-negara berkembang seperti Turki, Mesir, dan Indonesia.

Keenam, pembasmian atas dasar identitas (*genocide*). Apa yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap kalangan Yahudi di Jerman merupakan salah satu bentuk pembasmian terhadap identitas tertentu. Tindakan ini merupakan bentuk intoleransi yang paling buruk, karena meninggalkan trauma yang amat panjang bagi korban. Apalagi trauma tersebut mampu membangun kesadaran intoleran bagi mereka. Harus

diakui, bangsa ini belum mengalami intoleransi model ini, meskipun kecenderungan ke arah itu mulai terlihat.³⁶

Beberapa penjelasan di atas dapat dijadikan sebagai pijakan untuk melihat sejauh mana intoleransi dipraktekkan dalam sebuah masyarakat. Ide dasarnya, bahwa jika sebuah negara menerapkan toleransi dengan baik, maka negara tersebut akan semakin mampu mengatasi problem intoleransi yang akan mengancam. Sebaliknya, jika yang dominan adalah intoleransi, maka toleransi akan mendapat tantangan yang sangat serius.³⁷

7. Teori Konflik Beragama

Agama sebagai supra struktur, jika ditinjau dari teori konflik bisa menimbulkan konflik dalam kategori yang manifes, yaitu terwujud dalam indikator perilaku maupun sebagai sesuatu yang sifatnya laten, yaitu sifatnya masih potensial (Fisher dalam Geriya; 2004). Perbedaan dalam berbagai aspek, apalagi perbedaan dalam aspek keagamaan, baik perbedaan paham antara satu sekte di dalam internal satu agama, maupun antar satu agama dengan agama yang lain pasti menimbulkan konflik. Jadi perbedaan paham keagamaan di dalam satu agama maupun dari agama-agama yang berbeda sudah melekat di dalam kehidupan keagamaan dan merupakan suatu potensi konflik. Sebab masing-masing umat beragama selalu ingin mempertahankan keberadaan agamanya agar tetap survival di tengah-tengah kehidupan bersama di dalam masyarakat.

Kenyataan ini disadari atau tidak disadari, diakui maupun tidak diakui, merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun potensi konflik yang melekat dalam setiap agama sebagai supra

³⁶ Baca juga Ismail Hasani, *Op.cit*, hlm 36.

³⁷ Zuhairi Misrawi, *Op.Cit*.

struktur tidak dengan sendirinya manifes menjadi konflik sosial tanpa faktor lain yang memicunya. Dalam realitasnya, pemantik dari konflik tersebut sering bermuara pada infra struktur berupa kepentingan politik, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, dan bahkan ada kalanya masalah keluarga dan asmara pun bisa.³⁸

Dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang mapan, pluralisme agama tetap menyimpan potensi konflik yang besar. Dalam situasi politik yang tidak menentu, tentu potensi konflik itu akan semakin besar. Terbukanya keran demokratisasi secara absolut terbukti menimbulkan berbagai tindakan “main hakim sendiri” dimana-mana. Sementara kondisi kesenjangan ekonomi secara etnis bisa dipolitisasi menjadi konflik antar agama. Masih banyak hal krusial dari kemajemukan bangsa yang bisa dipolitisasi menjadi konflik antar agama. Negara, dalam hal ini pemerintah, hendaknya menyadari betapa besar potensi konflik yang bisa ditimbulkan akibat dari pluralisme agama. Selanjutnya pemerintah hendaknya mencari penyelesaian yang komprehensif sebelum pluralisme agama tersebut berkembang lebih jauh menjadi tragendi peradaban.

Pemerintah telah mengambil berbagai usaha dan langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan mencari solusi atas berbagai konflik bernuansa agama. Konflik-konflik bernuansa agama manifes melalui berbagai aktifitas sosial. Diantaranya yang paling menonjol adalah pendirian rumah ibadah. Pemerintah sejak awal telah menengarai bahwa aktifitas pendirian rumah ibadah mengandung potensi konflik dan bisa berkembang menjadi isu SARA. Pemerintah sering dianggap tidak adil dalam memberikan ijin pendirian rumah ibadah yang diusulkan oleh masing-masing umat beragama. Sebagai antisipasi atas kemungkinan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2008

³⁸ I Ketut Widnya, *Op.Cit.* hlm 3-5.

tentang” Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah”.³⁹

Ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah diatur dalam pasal 14 Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini. Peraturan ini membatasi pendirian rumah ibadah. Dalam batas-batas tertentu, peraturan ini dinilai merugikan semua umat beragama. Agama yang memiliki jumlah umat sedikit sering tidak bisa mendirikan rumah ibadah di dalam suatu lingkungan wilayah dimana agama itu menjadi minoritas dari aspek jumlah umatnya. Seharusnya kalau berbicara ideal, tentu pembatasan ini salah. Sebab dalam NKRI tidak ada istilah mayoritas-minoritas. Tetapi itulah realitas kebangsaan saat ini.

Wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh para elit bangsa tidak sama dengan yang dimiliki oleh masyarakat akar rumput. Karena itu, realitas kebangsaan Indonesia yang pluralistis sering direspon dengan cara yang berbeda-beda antara para elit bangsa dengan masyarakat bawah, bahkan respon itu sering berlawanan secara diametral. Bagi umat beragama sebagai bagian dari warga bangsa, peraturan ini hendaknya diamini sebagai “kontrak” warga negara kepada negara. Terutama para pemimpin umat beragama hendaknya mempunyai pandangan yang sama terhadap persoalan toleransi keagamaan ini.⁴⁰

G. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Analisis dalam penelitian ini dibangun dengan menggunakan pendekatan kelas sosial dari Mark dan Weber, pendekatan ini berdasarkan keunggulan yang dimilikinya

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lihat juga Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*, Routledge, London and New York, 1995, hlm 1.

dianggap relevan untuk mengungkap permasalahan utama penelitian sebagaimana telah dirumuskan dalam permasalahan penelitian. Sedangkan jenis penelitian kualitatif dipilih untuk menjelaskan data yang bersifat analitis-interpretatif melalui penggabungan beberapa fakta dari sumber yang berbeda.

Data utama diperoleh melalui studi pelacakan (*tracer study*) kepada sejumlah sumber data utama yaitu jurnal-jurnal dan buku-buku termutakhir yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian ditunjang dengan data wawancara mendalam (*indept interview*) serta pengkayaan dari berbagai literatur dan sumber-sumber pengkajian dan analisis yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, sehingga peneliti memperoleh informasi memadai mengenai masalah empiris yang hendak dipecahkan.

Metode ini lebih dimungkinkan agar peneliti mempunyai akses yang luas dalam mendekati data, sehingga kemudian mampu untuk mengembangkan komponen-komponen keterangan yang sifatnya konseptual, analitis, dan kategoris dari data itu sendiri, baik dari teknik-teknik yang telah terkonsep maupun dari teknik-teknik yang tidak dikonsepsikan sebelumnya. Metode penelitian ini dipilih karena beberapa kelebihan yang terkandung di dalamnya seperti misalnya memahami perilaku kelas (personal dan organisasional) berdasarkan latar yang lebih konseptual, serta adanya pemahaman yang lebih luwes dan lebih mendalam untuk menemukan hal-hal yang tidak terduga dalam penelitian.

Dengan metode seperti ini, maka tipe penelitian yang digunakan menjadi bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif⁴¹ ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang terjadi atau telah terjadi pada masa lampau

⁴¹ Lebih lanjut mengenai metode deskriptif, Lihat Stuart A Schlegel, *Asas-Asas dan Metodologi Penelitian Grounded*, Semarang: Reproduksi oleh Universitas Sebelas Maret Fakultas Sosial Politik, 1982, hlm 4.

dengan menyelidiki fenomena historis dalam konteks implementasi nyata, batas antara fenomena dan konteks tak tampak tegas serta memanfaatkan multi analisis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif melalui serangkaian langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi data, serta akhirnya pengolahan data dan analisis data.

Di samping itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian eksploratif⁴², dimana penelitian ini pada dasarnya bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum memiliki hipotesa. Melalui penelitian ini, masalah penelitian dapat dirumuskan dengan jelas dan lebih terperinci serta dapat dikembangkan. Tujuannya adalah tidak hendak membangun suatu teori, akan tetapi mencoba untuk menjelaskan suatu teori dalam implementasi nyata setelah melakukan ujian empiris terhadap berbagai teori yang sudah mapan.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan menjelaskan peran kelas menengah Islam dalam menangkal radikalisme dan mewujudkan toleransi beragama pasca reformasi. Untuk mengungkap permasalahan secara menyeluruh melalui pemanfaatan data-data yang telah diperoleh, dilakukan melalui teknik penelusuran literatur (*library research*) dan studi pelacakan (*tracer study*) kepada sejumlah sumber data utama yaitu jurnal-jurnal dan buku-buku termutakhir yang relevan dengan permasalahan penelitian, atau pun lewat sumber-sumber sekunder seperti wawancara dengan tokoh, berita koran dan majalah, atau pun artikel di internet yang dianggap valid.

Studi literatur dalam penelitian ini dirancang untuk mendapatkan keterangan dan data dari para pakar dan berbagai gagasan dalam tulisan untuk keperluan informasi,

⁴² J Vredenburg, *Metode dan Teknik penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm 3.

seperti tulisan para cendekiawan, tulisan dan wawancara tertulis para aktifis gerakan Islam, simpatisan dan pengurus organisasi agama, dan beberapa tokoh Islam atau pemuka masyarakat lainnya yang dianggap berpengaruh. Lebih tepatnya mereka disebut sebagai sumber ahli, terutama atas pertimbangan keahlian atau karena kedudukannya dalam organisasi, sehingga dipandang layak dan memiliki relevansi yang sebangun dengan materi penelitian. Langkah selanjutnya adalah pengembangan data dari studi literatur termutakhir ke dalam variabel utama penelitian, seperti buku terbitan ilmiah nasional/internasional, jurnal ilmiah termutakhir, buku pedoman organisasi, dan tulisan tokoh di media massa.

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam hal ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui wawancara tokoh, dokumen resmi dan tidak resmi, hasil seminar, berita-berita media massa, dokumen/catatan yang dikeluarkan oleh suatu institusi, organisasi sosial/keagamaan, para aktivis gerakan Islam, wawancara beberapa tokoh organisasi sosial keagamaan dengan media massa, artikel para analis, dan lain-lain.

Sedangkan data primer diperoleh melalui teknik analisis dan penggalian terhadap gagasan-gagasan utama yang terdapat di dalam buku atau jurnal ilmiah. Data dari buku dan jurnal ilmiah dipilih sebagai data inti karena gagasan serta pendapat ahli di dalam buku dianggap memiliki kekuatan ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, untuk memperkuat data dari sumber utama ini, maka kemudian ditunjang dengan data dari sumber sekunder yang bersifat pengembangan dan sebagai verifikasi terhadap data utama.

Pada intinya prosedur pengumpulan data penelitian dalam ini, maka ditempuh langkah-langkah antara lain: 1) Membaca dan mempelajari literatur, referensi atau

bahan pustaka yang mempunyai hubungan dan menunjang terhadap persoalan dan permasalahan dalam penelitian ini. 2) Melakukan wawancara dan mencatat hal-hal penting, yang diharapkan dapat menemukan kajian-kajian yang relevan serta berkesinambungan dengan apa yang akan diteliti. 3) Memasukkan data yang di peroleh ke dalam instrumen analisis data, kemudian dianalisis sehingga didapat data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai sejak pengumpulan data berlangsung, dimana setiap informasi dan data yang ditemukan dari sumber primer kemudian di-*reinforcement* dengan data dan informasi dari sumber sekunder sehingga didapatkan data yang lebih akurat dan obyektif. Selanjutnya analisis dilakukan melalui penyaringan data, pengolahan data, penyimpulan serta uji ulang setiap interpretasi logis.

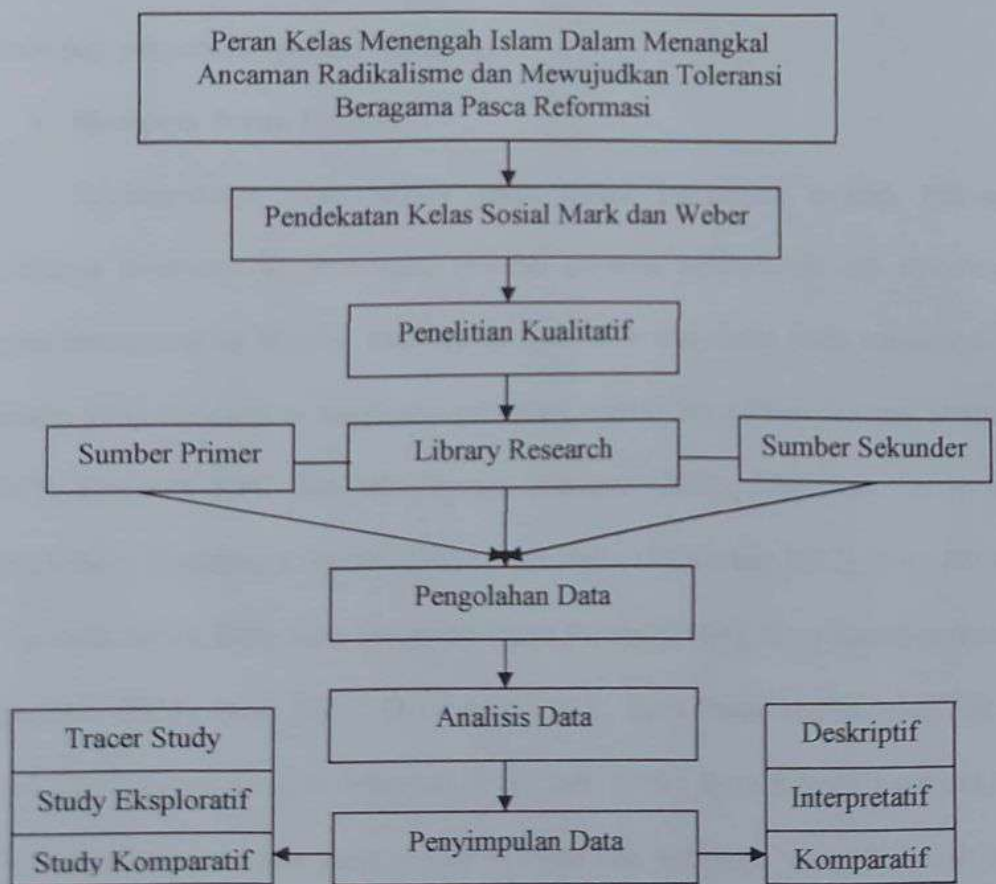
Data yang terkumpul akan disaring dan disusun ke dalam kategori-kategori, selanjutnya akan saling dihubungkan dari berbagai sumber dan variabel yang berbeda. Melalui proses inilah penyimpulan dibuat dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperluas bukti yang dijadikan landasan. Pengujian juga dilakukan terhadap interpretasi data sebelumnya secara simultan dalam suatu kerangka uraian logis dan kausalistik untuk memperkokoh bukti penguat kesimpulan dari beberapa sumber.

Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu triangulasi dan interpretasi. Metode triangulasi pada dasarnya berpijak pada validitas temuan-temuan, dan tingkat kepercayaan akan tinggi dengan pemakaian lebih dari satu teknik pengumpulan data. Menurut Maleong, metode ini merupakan teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data.⁴³

Penelitian ini menggunakan metode analisis interpretatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan makna serta analisis terhadap obyek-obyek, peristiwa, dan tindakan aktor. Metode ini berusaha mencari makna secara luas dan mendalam atas tindakan sosial dan politik obyektif dengan cara berempati terhadap agen serta peristiwa yang melakukan aksi, baik yang berupa ekspresi bahasa / tulisan atau pun aktifitas dan perilaku yang lain.

SKEMA PENELITIAN



⁴³ Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm 16.

BAB II HASIL PENELITIAN

A. PERAN KELAS MENENGAH MUSLIM DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RADIKALISME

Dalam penelitian ini, peran kelas menengah muslim dalam menghadapi ancaman radikalisme pasca reformasi, pertama dapat diungkap melalui pemahaman terhadap nilai eksistensi kaum ulama dan akademisi sebagai dua kekuatan sosial (*social capital*) yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat dan dunia pendidikan. Kemudian langkah kedua adalah mengungkap berbagai bentuk peran ulama dan akademisi yang selama ini diduga kuat telah memberi dampak yang sangat besar bagi pembentukan benteng penangkal penyebaran paham radikalisme.

1. Mengapa Peran Ulama?

Sesungguhnya telah terukir pahit dalam bentangan sejarah bahwa pasca terjadinya reformasi di Indonesia, muncul gerakan radikalisme dan terorisme yang begitu mengguncang kondisi masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya. Sebuah gerakan yang melahirkan rangkaian peristiwa seperti Bom Plaza Atrium Senin Jakarta (2001), Restoran KFC dan MC Donald Makasar (2002), Mall Ratu Indah Makasar (2002), Bom Kedutaan Filipina (2002), Bom Bali (12 Oktober 2002), Bom JW Marriott (5 Agustus 2003), Bom Kafe Sampodo Indah Palopo (2004), Bom Kedubes Australia (9 September 2004), Bom Bali II (1 Oktober 2005), Bom Pasar Maesa Palu (2005), Bom Hotel Ritz Carlton dan JW. Marriott II (17 Juli 2009), Bom Kantor Kapolres Cirebon (2011), dan pembunuhan yang terjadi di Poso dan beberapa teror di daerah lainnya. Pada periode yang sama juga merebak kelompok-kelompok yang anti NKRI dan

Pancasila, mereka kerap mengkampanyakan negara khilafah dan akan membentuk Daulah Islamiyah atau Negara Islam.⁴⁴

Meskipun sempat dibuat kalang kabut pada masa-masa awal, pemerintah dengan dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI akhirnya mampu mengendalikan situasi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam memberikan rasa aman yang dibutuhkan masyarakat. Sampai disini, apakah persoalan selesai dan ancaman radikalisme dan terorisme mutlak sirna dari bumi Indonesia? Ternyata jawabannya “tidak sama sekali”. Karena faktanya berbagai aksi radikal dan peristiwa kekerasan serta terorisme masih kerap terjadi hingga saat ini, meskipun usaha penanggulangan telah dilaksanakan tanpa henti, massif dan sistematis. Lantas dimanakah letak persoalannya?

Ahmad Syafi'i Ma'arif menjelaskan:

“Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa pendekatan kekerasan untuk mengatasi masalah terorisme, sebagaimana pengalaman empirik selama ini, mengajarkan kepada kita tidak akan pernah mempan. Kekerasan tidak akan mengurangi kadar terorisme mereka. Malah dendam mereka kepada aparat, khususnya kepolisian akan semakin dalam dan sulit dikendalikan. Saya tidak tahu apakah pembunuhan yang berlaku atas anggota kepolisian dilakukan oleh teroris atau oleh mereka yang sedang memendam dendam kepada aparat. Oleh karena itu harus dicari pendekatan lain yang lebih persuasif, arif, tetapi tegas”⁴⁵

Sejauh ini, nampaknya penanggulangan radikalisme dan terorisme masih banyak dilakukan melalui pendekatan keamanan dan pemidanaan. Sementara, penanggulangan radikalisme dan terorisme melalui pendekatan persuasif preventif dinilai belum dilakukan secara maksimal. Peran aparat khususnya kepolisian dan TNI dalam mengatasi masalah radikalisme di Indonesia masih begitu dominan. Menurut hemat penulis, ada semacam ketergantungan yang sangat tinggi dari pemerintahan sipil untuk

⁴⁴ HM Misbahussalam, *Peran Ulama dan Umara Dalam Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*, 14 April 2015. Diunduh di www.muslimedianews.com pada tanggal 1 September 2015.

⁴⁵ Baca Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Agama, Terorisme, dan Peran Negara*, dimuat dalam Jurnal Ma'arif Vol 8, No 1- Juli 2013, hlm 244-246.

menghadapi ancaman keamanan dengan senantiasa mengundang keterlibatan TNI-POLRI sebagai ujung tombak penyelesaian konflik.

Ada dugaan bahwa ketidaksanggupan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di masyarakat tanpa campur tangan aparat keamanan lebih disebabkan oleh warisan budaya politik otoriter di masa lalu dan ketiadaan kerja sama yang solid di antara kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang ada, khususnya pada era awal reformasi. Selain itu, juga disebabkan oleh begitu kuatnya ego sektoral aparat keamanan untuk mendominasi praktek pemberantasan radikalisme saat itu. Seolah muncul sebuah keniscayaan bahwa aparat keamanan adalah satu-satunya pihak yang paling mampu terlibat dalam “proyek” yang diduga menelan biaya yang tidak sedikit ini. Penulis juga menduga munculnya kecenderungan “komersialisasi dan provitisasi” gerakan penanggulangan radikalisme telah menyebabkan penanganan radikalisme dan terorisme tidak dilaksanakan secara komprehensif pada semua lini.

Hasyim Muzadi misalnya seorang ulama kondang dari NU mengemukakan bahwa penanggulangan radikalisme selama ini belum menyentuh wilayah hulu permasalahan, tetapi masih didominasi oleh penanganan sporadis yang bersifat hilir seperti penangkapan, penahanan, penembakan, penggerebekan terhadap sarang-sarang yang diduga menjadi tempat persembunyian para teroris. Padahal menurut Muzadi, persoalan terorisme harusnya dilakukan dari hulu (akar persoalan) sebagai fokus penindakan, yaitu bagaimana mengatasi kesalahpahaman keagamaan kaum radikal dalam memahami teks-teks agama seperti yang kerap mereka gunakan sebagai dalil pembenaran ideologi dan aksi mereka. Oleh sebab itu, jika dipahami bahwa letak persoalan sebenarnya adalah kekeliruan dalam memahami tek-teks agama, maka

disinilah peran vital para ulama dalam melakukan pencerahan dan penangkalan dini terhadap munculnya paham radikalisme tersebut.

Selanjutnya Muzadi mengatakan:

“Penangkalan radikalisme baru pada hilir bukan pada hulu. Hulunya sama sekali tidak tersentuh sehingga harus bersama ulama berkualitas dan harus dilindungi. Ngajinya orang-orang keras gurunya jauh-jauh dari Yaman, Sudan dan lain-lainya. Coba ngaji dengan kyai dekat-dekat, karena NU dan Muhammadiyah produk made in Indonesia”.⁴⁶

Muzadi pada tulisan lain, juga menyinggung peran dominan Polri dan TNI dalam penanggulangan radikalisme selama ini. Menurutnya menguatnya paham “TNI/POLRI centris” yang selalu dikedepankan dalam menangani radikalisme dan terorisme sangat jauh dari harapan penyelesaian masalah pokoknya. Bahkan model penanganan TNI/POLRI cenderung menyuburkan semangat api dendam kelompok radikal dan pelaku teror terhadap kedua institusi ini. Sebagaimana yang sering terdengar terjadinya penyerangan oleh orang tak dikenal terhadap aparat kepolisian. Misalnya pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2012, sekelompok teroris muda menyerang pos polisi di Solo, meskipun kemudian pada 30 Agustus setelah itu, Tim Densus 88 berhasil menembak mati dua teroris muda, meski seorang polisi juga tewas dalam baku tembak di jalanan Kota Solo.⁴⁷

Oleh sebab itu Muzadi menawarkan penguatan peran ulama dan kaum sipil Islam dalam memberantas semangt radkalisme, seperti yang ia kemukakan:

“Saya mau bukan polisi yang mengantisipasi dan mencegah tumbuhnya radikalisme di Indonesia karena polisi kalah dalil sama mereka. Harus diatur juga dalam manajerial tidak dilepas sendiri-sendiri tugas dari para ulama dan umaro untuk mengantisipasi munculnya gerakan radikalime. Ulama kita yang

⁴⁶ Merdeka.com, Selasa 7 April 2015, *Hasyim Muzadi beberkan kelemahan pemerintah tangkal paham ISIS*. Diunduh pada tanggal 1 September 2015.

⁴⁷ Baca juga Endang Suryadinata, *Terorisme, Radikalisme, dan Deradikalisasi*, dalam harian Sinar Harapan 15 September 2015. Diunduh pada tanggal 1 September 2015.

sebenarnya harus diikuti cawe-cawe tidak diikuti. Para ulama harus dilengkapi dengan informasi utuh terhadap perkembangan radikalisme.⁴⁸

Umumnya para ulama, dan khususnya ulama yang berbasis di pesantren sebagai salah satu representasi kelompok kelas menengah Islam bersama dengan kaum cendekiawan adalah salah satu elemen dari kekuatan masyarakat sipil yang selama ini masih dianggap sebagai modal sosial (*social capital*) terbesar yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menghadapi segala bentuk ancaman keamanan domestik maupun global yang sewaktu-waktu dihadapi oleh negara. Ulama dan cendekiawan juga merupakan golongan yang *pure (free of political interest)* dari segala bentuk pragmatisme jangka pendek.

Keunggulan kelas menengah menurut Brantlinger adalah terletak pada ideologi mereka yang bercorak rasional. Ideologi ini kemudian membentuk persepsi, opini, kepercayaan, dan tindakan dalam konstruksi sosial di tengah masyarakat, menjadikan kelas menengah dapat mempengaruhi kebijakan negara dan lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Brantlinger, sebagaimana perspektif Marxist maupun Gramscis ideologi sebagai proses dominasi dan kekuasaan pada akhirnya akan mengerucutkan kelas menengah terdidik (*educated middle class*) menjadi pusat ordinat dari subordinasi sosial dalam masyarakat.⁴⁹

Sementara itu, radikalisme dan terorisme adalah dua persoalan lokal dan global yang paling berat dihadapi oleh komunitas internasional dan negara-negara muslim dewasa ini tak terkecuali Indonesia. Sejauh ini para ulama telah mengambil peran yang sangat nyata dalam memerangi pengaruh radikalisme di Indonesia. Mengingat posisi ulama menempati ruang yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam berbagai lini kehidupan masyarakat.

⁴⁸ Merdeka.com, Selasa 7 April 2015, *Op.Cit.*

⁴⁹ Ellen Brantlinger, *Op.Cit.*, hlm 4.

Apalagi bila dikaitkan dengan berbagai penyebab munculnya paham radikalisme itu sendiri yang cenderung berasal dari warisan pertarungan paham dalam internal agama.

Salah satu penyumbang terbesar masalah radikalisme adalah disebabkan oleh faktor ketidaktahuan dalam memahami ajaran agama. Apabila yang dimaksud dengan agama ini adalah agama Islam, maka jika mengacu pada penjelasan Hasyim Muzadi sebelumnya, maka disinilah sebenarnya ulama dapat dilibatkan kemampuannya dalam memainkan peran, berpartisipasi dalam aksi penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Sehingga konsekuensi logis dari keterlibatan peran ulama tersebut dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, maka di kalangan ulama minimal terdapat satu alasan paling mendasar sebagai justifikasi tindakan. Alasan tersebut adalah, mereka melihat radikalisme dan terorisme sebagai sebuah kemungkaran yang harus diberantas. Maka, memberantas kemungkaran adalah bagian dari ajaran amar makruf nahi mungkar. Para ulama yang berpedoman kepada paham ini, mereka giat melakukan penyuluhan dan pencerahan dengan menunjukkan kepada umat bahwa perilaku radikal itu adalah sebuah kemungkaran dan menasihati agar mereka tidak melakukannya. Sesungguhnya itulah tugas para ulama dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar.

2. Bentuk-Bentuk Peran Kaum Ulama

As'ad Said Ali sebagai salah seorang pengurus pusat Ormas NU menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, para ulama di Ormas Nahdlatul Ulama khususnya telah melakukan langkah-langkah nyata dalam melakukan penanggulangan radikalisme. Misalnya dalam Muktamarnya ke 32 di Makassar pada 2010, NU mengajukan tema "Khidmah Nahdliyah Untuk Indonesia Bermartabat". Tema tersebut sengaja disusun berdasarkan keprihatinan merebaknya paham-paham radikal, baik radikal agama

maupun ultra liberal, sehingga dikawatirkan meredupkan sikap moderat yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia.

Dijelaskan oleh Salvatore dan Eickelman, ulama adalah sosok gambaran tentang sumber kebaikan bersama (*common good*) dalam sebuah masyarakat. Suara dan pilihan mereka menjadi acuan tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, namun juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan para ulama umumnya bersumber dari kaedah-kaedah agama (*ushul fiqh*) sehingga memberi pijakan yang kuat bagi para pengikutnya (*ummah*). Dalam kontestasi peran, radikalisme sendiri adalah (*masalahah ummah*) atau *public interest* yang dihadapi oleh ulama sesuai dengan perannya sebagai penjaga nilai-nilai kebaikan bersama dalam masyarakat.⁵⁰

Selama ini Islam Indonesia digambarkan sebagai Islam yang santun, damai, dan toleran, dapat hidup berdampingan secara rukun dalam langgam pluralisme nusantara yang menjadi ciri khas Indonesia sejak dulu. Namun mencengangkan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan berganti dengan era reformasi dan demokratisasi, muncul gejala yang meluas terkait penyebaran paham radikal yang kerap kali berujung pada aksi terorisme dan tindakan kekerasan lainnya. Oleh karena itu, menurut As'ad Ali para ulama NU turut prihatin dan turun tangan mencoba memberi solusi bagi persoalan tersebut dengan menawarkan berbagai program aksi sosial ulama.

Program aksi tersebut meliputi 3 hal, yakni dakwah, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Tersirat di dalamnya kehendak untuk membangun kemandirian umat, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi memperkuat ajaran *ahlussunah wal jamaah* (Islam Nusantara) yang moderat dan toleran dan menjauhi kekerasan, berkeadilan, dan berkeadaban. Untuk itu sebagai kelanjutannya, maka pada Muktamar

⁵⁰ Armando Salvatore dan Dale F Eickelman, *Op.Cit.*

ke 33 NU di Jombang, Jawa Timur 1-5 Agustus 2015, sikap NU dalam merespon perkembangan global dan nasional semakin dipertegas dengan mengambil tema “Mengukuhkan Islam Nusantara untuk Indonesia Dan Peradaban Dunia.

Adapun semangat para ulama NU pada muktamar terakhir adalah bahwa Indonesia dalam konteks global saat ini harus mampu memberikan kontribusi yang penting bagi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan masyarakat global, ditambah juga bahwa Islam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang dapat menjadi kiblat bagi model kehidupan masyarakat muslim di seluruh dunia. Memang nampak ada usaha yang disengaja untuk menggeser kiblat pengembangan Islam dari yang sebelumnya berpusat pada wawasan ke-Islaman timur tengah yang oleh penulis sendiri diistilahkan dengan “Islam ketimur-tengahan” (*middle east centris*) yaitu sebuah model ke-Islaman yang cenderung kaku dan tekstual, bergeser ke arah pengembangan wawasan ke-Islaman Melayu yang bercorak lebih humanis dan kontekstual.

Terkait dengan corak “Islam ketimur-tengahan” dalam sebuah wawancara dengan salah seorang ulama pesantren menjelaskan:

“Geneologi paham radikalisme di Indonesia banyak diwarisi dari aqidah Wahabi dan Khawarij dari timur tengah. Ciri dari paham ini adalah mereka merasa paling benar, tidak menerima perbedaan pendapat. Jadi kami mewaspadai perkembangan paham seperti ini di tengah santri dengan cara melakukan *screening* ketat terhadap ideologi guru yang mengajar santri agar mereka tidak tertular”.⁵¹

Secara garis besar program aksi ulama di NU, baik yang sedang maupun akan dilaksanakan sebagaimana dijelaskan Asa’ad Ali adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam bidang dakwah berupa langkah-langkah afirmasi nilai-nilai *ahlussunah wal jamaah* sekaligus untuk menegasi paham-paham radikal di masyarakat terutama melalui program kaderisasi yang intensif. Inti dari dakwah tersebut menegaskan pentingnya

⁵¹ Dr. H. Afifuddin, ulama pengasuh pesantren An-Nahda di Makassar, hasil wawancara tanggal 21 September 2015.

Islam Nusantara yang dikembangkan oleh para penyebar Islam sejak awal dakwah Islam di Nusantara yang mampu mewujudkan budaya dan peradaban yang beradab, toleransi, harmoni dan cinta damai.

Termasuk dalam kegiatan dakwah afirmatif ini adalah berperan serta dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama dalam level global. Sebagai contoh, NU menyelenggarakan dialog internasional melalui pengiriman delegasi ke Afghanistan dan juga mengundang ulama Afghanistan berkunjung ke Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan nilai-nilai *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (moderat), *tawazun* (berimbang), *'adalah* (keadilan), dan *ukhuwah* (persaudaraan) yang meliputi *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama Islam), *ukhuwah wathoniyah* (persaudaraan sesama warga negara), *ukhuwah basyariah* (sesama umat manusia). Dialog dan saling kunjung-mengunjungi itu membuahkan hasil dengan dibentuknya Nahdlatul Ulama Afghanistan pada sekitar Agustus 2014 di Kabul.

Misalnya di lingkungan pesantren, dakwah afirmatif dilakukan para ulama dengan cara membuka keran-keran diskusi publik dan kajian wacana-wacana keagamaan secara luas dan terbuka. Sehingga mempersempit kemungkinan berkembangnya pemahaman keagamaan yang eksklusif. Dampak dari kegiatan ini bagi kalangan santri ialah tumbuhnya semangat pluralisme yang demokratis serta *open minded* terhadap pemikiran-pemikiran kontemporer.⁵²

Kedua, peran ulama dalam bidang sosial meliputi pelayanan sosial melalui pemanfaatan zakat, infaq, dan shodaqoh. Khusus pelayanan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas umat melalui pembaharuan kurikulum yang seimbang antara substansi agama dan keduniawian guna membentuk generasi yang berpandangan luas,

⁵² Dr. H. Afifuddin, *Ibid*.

teguh pada jati diri bangsa dan mandiri. Studi tentang Islam nusantara mulai dikembangkan agar bisa menjadi alternatif model Islam dunia untuk mengatasi keterpurukan umat Islam. Kegiatan sosial ini penting untuk mewujudkan empati kepada mereka yang termarginalkan secara sosial.

Terkait dengan usaha mengintegrasikan paham Islam Nusantara dan membangun keseimbangan antara materi agama dan umum ke dalam kurikulum pendidikan, dalam sebuah wawancara ulama pesantren lainnya menjelaskan:

“Kurikulum kami di Pondok Pesantren selama ini terdiri dari kurikulum Departemen Agama yang mengajarkan materi umum maupun agama dan ada kurikulum pesantren. Kurikulum sangat penting untuk mencegah radikalisme di kalangan santri. Di Pesantren kami juga diajarkan mata pelajaran Pancasila, Kewarganegaraan, dan kami setiap hari Senin melakukan upacara bendera. Semua ini ditujukan dalam rangka menjaga NKRI”.⁵³

Ketiga, peran ulama dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat. Kegiatan ini diarahkan untuk mengelorakan jiwa kewirausahaan dikalangan umat Islam pada umumnya dan khususnya Nahdliyin. Pengembangan ekonomi syari’ah mempunyai tujuan jangka menengah dan jangka panjang guna membentengi umat dari dominasi kapitalisme global. Kegiatan ini sekaligus untuk mempraktekkan semangat plularitas di bidang ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, suatu sinergi antara mereka yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah demi kemaslahatan bersama.

Pengembangan ekonomi syari’ah berkaitan dengan anggapan bahwa radikalisme hadir di masyarakat akibat kekurangan ekonomi. Banyak kalangan menilai pemerintah perlu memberdakan ekonomi masyarakat terutama sistem ekonomi Islam. Sebaliknya sistem ekonomi kapitalisme dianggap hanya menciptakan kesejahteraan yang tidak merata. Sistem ekonomi kapitalisme dinilai merusak dasar-dasar kebudayaan dan menyingkirkan mereka yang lemah secara ekonomi. Ketidak-berdayaan umat Islam

⁵³ Dr. H. Fathurrahman, ulama pengasuh Pesantren Biru di Bone, hasil wawancara tanggal 23 September 2015.

terhadap hegemoni ekonomi kapitalisme menyebabkan sebagian umat Islam melakukan resistensi. Oleh sebab itu pemberdayaan ekonomi syariah adalah solusi alternatif membangun kembali sistem ekonomi umat Islam yang lebih merata dalam menangkal penyebaran paham radikal yang kerap menasar kaum ekonomi lemah.

Ketiga program aksi di atas dilaksanakan pada level struktur mulai dari pengurus besar, wilayah, cabang, lembaga dan badan-badan otonom. Disamping itu program-program tersebut dilaksanakan pada level non struktural seperti lembaga-lembaga pendidikan milik NU, pesantren, masjid, dan surau-surau. Sebagai contoh Anshor menjalankan program moderasi melalui pembentukan densus 99 dengan kegiatan spiritual untuk mendukung kebijakan pemberantasan terorisme dan radikalisme. Muslimat dan Fatayat NU membentuk ribuan pendidikan anak usia dini yang bertujuan menanamkan sikap beragama yang moderat dan toleran.

Menurut penilaian As'ad Ali program ini sangat tepat, dari segi waktu sangat relevan dengan kondisi kekinian dan berharap menghasilkan dampak yang nyata bagi terwujudnya harmoni dan kedamaian masyarakat Indonesia dan dunia yang beradab serta berkeadilan. Sebab fenomena atau potensi konflik peradaban haruslah mampu ditransformasikan menjadi dialog antar peradaban.⁵⁴

3. Mengapa Peran Guru dan Akademisi?

Selain ulama sebagai bagian dari klasifikasi kelas menengah muslim yang merupakan kaum intelektual tradisional yang notabene berbasis di Ormas-Ormas Islam dan di Pondok Pesantren. Ada satu lagi kelompok kelas menengah muslim yang memiliki pengaruh yang sangat luas dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia selama ini yaitu barisan kaum intelektual kampus atau yang biasa disebut

⁵⁴ As'ad Said Ali, *Peran Nahdatul Ulama Dalam Menangkal Radikalisme*, 26 Maret 2015. Diunduh pada tanggal 1 September 2015.

dengan akademisi. Mereka umumnya berkarir, mengajar, memproduksi dan menyampaikan gagasan-gagasannya dari lingkungan kampus lewat berbagai cara dan media. Mereka dapat “berdakwah” lewat media cetak yang sangat sering dilakukannya, dapat pula melalui media elektronik, atau melalui forum-forum seminar dan diskusi publik dimana mereka sering diundang sebagai nara sumber.

Mengenai peran penting perguruan tinggi, seorang akademisi sekaligus pimpinan sebuah perguruan tinggi menjelaskan:

“Menurut saya perguruan tinggi pasti memiliki peran penting dalam gerakan penanggulangan radikalisme, dimana para pelaku radikalisme kebanyakan terdiri dari kaum usia muda. Peran tersebut dilakukan dengan cara memperkuat basis pemahaman keagamaan para kaum muda di kampus agar tidak muda terjebak dalam pemahaman keagamaan yang sempit yang kerap menjadi penyebab radikalisme dan terorisme. Maka peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman yang luas dengan cara salah satunya adalah rekonstruksi kurikulum. Selain itu para dosen juga bisa berperan dengan cara menulis buku yang dapat memberi pencerahan terhadap masalah radikalisme seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa orang teman di kampus ini”⁵⁵.

Oleh karena itu, sangat luas peran yang bisa dilakukan oleh kaum akademisi dalam rangka menanggulangi bahaya radikalisme, terutama menyangkut radikalisme kaum muda, dimana mereka hampir setiap hari berinteraksi dengan pemuda/mahasiswa di dalam proses perkuliahan, sehingga dengan demikian hampir dapat dipastikan terjadi internalisasi proses pengetahuan yang disampaikan oleh para akademisi kepada pihak mahasiswa dan pemuda.

Selain itu, ada juga peran yang harus dijalankan oleh kaum akademisi di kampus dimana setiap perguruan tinggi memiliki ajaran Tridarma Perguruan Tinggi yakni selain aktifitas mengajar dan mendidik serta melakukan penelitian ilmiah, para akademisi juga memiliki kewajiban yang melekat pada tugas dan profesi mereka yaitu pengabdian

⁵⁵ Prof. Dr. H. Haddise, seorang akademisi sekaligus Ketua STAIN Watampone, hasil wawancara tanggal 1 Oktober 2015.

kepada masyarakat. Pada domain inilah peran sosial kaum akademisi sangat kuat dalam menopang upaya edukasi dan pencerahan kepada masyarakat, termasuk diantaranya tanggung jawab sosial penanggulangan bahaya radikalisme pemuda melalui penyebaran gagasan-gagasan yang damai, toleran, dan mencerahkan.

Endang Suryadinata misalnya seorang pemerhati masalah radikalisme dan terorisme dalam tulisannya menulis bagaimana peran penting akademisi dalam menghadapi ancaman radikalisme dapat dilihat contoh kasus dari negeri Belanda. Disana pemerintah Belanda menyadari betul bahwa perang terhadap radikalisme dan terorisme tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan pihak negara semata (*government act*), tetapi pemerintah Belanda menjalin sinergi yang kuat dengan kalangan akademisi di kampus dalam rangka membangun strategi menghadapi ancaman radikalisme (*collaboration act*).

Nampaknya pada periode waktu yang hampir sama, apa yang terjadi di Belanda tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia ternyata juga menghadapi ancaman radikalisme yang muncul di kalangan kaum imigran asal Maroko, Somalia, atau Timur Tengah lain. Radikalisme itu memuncak pada terbunuhnya politikus Belanda Pim Fortuijn pada 2002 dan sineas Theo Van Gogh pada 2004, yang dinilai telah melecehkan Islam.

Terbunuhnya kedua sosok itu mendorong pemerintah Belanda mencari jalan untuk mengatasi radikalisme agama. Pemerintah Belanda menggandeng para pemikir dan perguruan tinggi guna menghadapi radikalisme agama. Froukje Demant misalnya seorang akademisi dan peneliti radikalisme yang terkenal di Belanda. Dia menyarankan agar pemerintah Belanda yang sekuler lebih terbuka untuk argumen-argumen religius dan kaum muslim moderat harus mengajak sesama muslim yang radikal masuk ke

mainstream Islam yang damai. Meskipun hal itu tentu bukan saran yang mudah bagi pemerintah disana.

Lebih jauh, Suryadinata menjelaskan bahwa dalam hal radikalisme, pemerintah Belanda sangat menghargai jasa para pemikir Islam Timur Tengah yang ditampung sebagai akademikus migran di sejumlah kampus atau pusat riset di Belanda. Abdul Karim Soroush yang asal Iran misalnya, segaris dengan iklim kebebasan Belanda dan berkontribusi dalam proses deradikalisasi kaum radikal. Oleh sebab itu, mungkin ada baiknya para tokoh agama, demikian juga para cendekiawan muslim di Indonesia untuk semakin memperkokoh sinergi dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme ini. Ini penting, bukan demi citra Islam yang positif saja, tetapi untuk membangun “koalisi permanen” menciptakan benteng kokoh guna memastikan Indonesia terbebas dari paham radikal dan teror.

Dalam kasus penanggulangan radikalisme di Belanda, pemerintah Belanda terus memantau atau melakukan supervisi atas lembaga-lembaga agama yang dianggap rentan menumbuhkan ide-ide radikal. Dinas intelijen Belanda AIVD juga selalu proaktif dalam melihat sesuatu yang berpotensi membahayakan keselamatan banyak orang. Polisi Belanda akan menyelidiki siapa pun yang berani memuji aksi kaum radikal. Hal ini senada dengan apa yang pernah disinggung Anсад Mbai, mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dia menyayangkan sikap beberapa tokoh agama atau ustad yang justru memuji teroris yang mati sebagai martir.

Anсад menambahkan, percuma polisi bekerja keras di lapangan, sementara setiap saat muncul teroris baru karena apa yang dilakukan dianggap sebagai pahlawan atau suhada. Dengan membiarkan segala puja-puji untuk para teroris, berarti masyarakat yang memiliki pemahaman moderat, sesungguhnya sudah kalah dalam peperangan

merebut hati dan pikiran. Oleh karena itu, selain memperkuat peran kelas menengah muslim sebagai lokomotif penanggulangan radikalisme saat ini, juga patut diwaspadai kemungkinan munculnya kelas menengah yang sama bergerak bertolak belakang serta menjadi penopang bagi suburnya paham radikal. Mengingat bahwa kelompok kelas menengah adalah kekuatan yang sangat berpengaruh dalam masyarakat.

Memang yang diperlukan dalam peperangan merebut hati dan pikiran adalah kesadaran bahwa masalah ini tidaklah ringan. Karena itu sebagaimana dijelaskan oleh Suryadinata, jangan lagi ada yang berlindung di balik kata, yang menganggap mereka yang memiliki pandangan radikal itu hanya segelintir orang, bukan mayoritas. Sebab tidak boleh dilupakan bahwa segelintir orang, dengan bom yang siap mereka ledakkan, bisa menghadirkan petaka dan bahaya bagi mayoritas orang. Jadi, setiap orang jangan bosan menyebut bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan. Agama apa pun akan mengutuk aksi teror. Upaya deradikalisasi harus terus dilakukan sehingga negeri ini akan bebas dari ancaman radikalisme dan terorisme.⁵⁶

4. Bentuk-Bentuk Peran Guru dan Akademisi

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti, ada beberapa titik sentral dimana profesi guru dan akademisi dapat menemukan bentuknya yang konkret dalam upaya mengantisipasi berkembangnya paham radikal di kalangan pemuda selama ini yaitu:

a. Upaya Membentengi Institusi Pendidikan Dari Radikalisme

“Terorisme tidak bisa dikalahkan hanya dengan membunuh, menembaki, menangkap para pendukungnya, atau merusak jaringannya, dibutuhkan upaya komprehensif, terpadu dan strategis untuk menanggulangi ideologi terorisme sampai ke akarnya. Yang bisa dilakukan di antaranya adalah program rehabilitasi dan membangun komunikasi untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat”⁵⁷.

⁵⁶ Endang Suryadinata, *Terorisme, Radikalisme dan Deradikalisasi*, Sinar Harapan 15 September 2012. Dunduh pada tanggal 1 September 2015.

⁵⁷ Brigadir Jenderal Polisi Hamidin, dalam Forum Sosialisasi Pencegahan Terorisme yang diselenggarakan oleh FKPT Aceh tanggal 19 September 2014. Diunduh dari wordpress.com pada tanggal 20 September 2015.

Demikian ungkapan salah seorang pejabat tinggi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), bahwa dalam paradigma penanggulangan terorisme dan radikalisme saat ini, pengembangan metode penindakan dari *hard approach* ke *soft approach* dinilai sangat efektif dan berakibat jangka panjang karena melibatkan sumber daya yang memiliki jangkauan sangat luas. Dalam paradigma ini fokus utama pelaku penanggulangan terorisme mengalami perubahan yaitu dari *state apparatus centris* ke *civil society centris* dimana elemen masyarakat sipil termasuk institusi sekolah dan kampus dijadikan sebagai garda terdepan benteng penanggulangan radikalisme. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai elemen masyarakat dengan negara mutlak dibutuhkan, termasuk sinergi dan peran aktif para guru di sekolah dan para akademisi (dosen) di lingkungan kampus.

Oleh sebab itu salah satu upaya penting yang dilakukan pemerintah melalui BNPT adalah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai daerah di tanah air. FKPT adalah salah satu bentuk program terpadu BNPT dalam mengatasi masalah penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Selama ini sudah dibentuk puluhan FKPT yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Forum-forum ini diharapkan menjadi organisasi yang lahir, tumbuh dan diberdayakan dari dan oleh masyarakat sendiri, dan menjadi benteng pertama pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Maka disinilah ruang keterlibatan para guru dan akademisi sebagai elemen penting masyarakat. BNPT sendiri selama ini memang menitikberatkan programnya pada metode *soft approach* dalam menanggulangi terorisme. Pendekatan ini lebih menekankan dialog dan silaturahmi ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan kepada

orang-orang yang terlibat dalam jaringan radikalisme dan terorisme. Upaya seperti ini diharapkan bisa memutus rantai kekerasan terorisme, dengan cara yang manusiawi.

Menurut Zuly Qodir, generasi muda saat ini telah menjadi sasaran empuk bagi penyebaran paham radikal dan terorisme. Menurutnya, salah satu elemen masyarakat yang sangat potensial dan rentan dengan radikalisasi adalah pemuda.⁵⁸ Sedangkan menurut Herni Susanti⁵⁹ dalam artikelnya sebagaimana dirujuk dalam tulisan ini, fenomena radikalisme di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius bagi anyaman kebhinnekaan bangsa di masa mendatang.

Menurutnya, akhir-akhir ini, radikalisme semakin menguat dan menysar pelaku sekaligus korbannya di kalangan generasi muda di dunia pendidikan. Maraknya aksi kelompok fundamentalisme yang radikal yang meresahkan masyarakat Indonesia menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Khususnya periode setelah reformasi, beberapa peristiwa seperti tragedi Bom Marriot, Bom Klaten, dan Bom Solo, menjadi bukti bagaimana radikalisme yang telah mewujud dalam tindakan terorisme terjadi di kalangan generasi muda, beberapa di antaranya masih aktif sebagai siswa di sekolah tertentu.

Sebagaimana dijelaskan Herni Susanti,⁶⁰ sekolah dan kampus menjadi ruang terbuka bagi diseminasi paham apa saja, termasuk paham keagamaan yang radikal. Karena pihak sekolah dan kampus adalah lembaga pendidikan dengan sistem terbuka, maka kelompok radikalisme keagamaan memanfaatkan ruang terbuka ini untuk masuk secara aktif mengkampanyekan pahamnya dan memperluas jaringannya. Sebagai konsekuensi dari menguatnya paham-paham keagamaan radikal di lingkungan sekolah

⁵⁸ Lihat Zuly Qodir, *Perspektif Sosiologi Tentang Radikalisme Agama Kaum Muda*, dimuat dalam Jurnal Ma'arif Vol 8, No 1- Juli 2013, hlm 45.

⁵⁹ Herni Susanti et.al, *Membentengi Pendidikan Dari Radikalisme*, www.wordpress.com, 19 Mei 2015. Diunduh 20 September 2015

⁶⁰ *Ibid.*

dan kampus, banyak siswa dan mahasiswa yang pemahaman ke-Islamannya menjadi monolitik dan gemar menyalahkan pihak lain.

Karena paham keagamaan yang tidak terbuka ini, maka paham kebangsaan mereka menjadi tereduksi dan menipis. Meskipun demikian, masih banyak pihak sekolah atau pun kampus yang kurang peduli dengan paham-paham radikal yang diajarkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan mereka. Kegiatan ekstra kurikuler ini menjadi pintu masuk yang efektif bagi infiltrasi kelompok-kelompok radikal di kalangan siswa dan mahasiswa.

Lalu apakah upaya yang dilakukan oleh para guru dan dosen dalam rangka membentengi institusi pendidikan dari pengaruh radikalisme? Peneliti melakukan penelusuran terhadap salah seorang akademisi yang menjelaskan:

“Memang sudah seharusnya para intelektual muslim mengambil posisi sebagai garda terdepan dalam pemberantasan radikalisme, karena orang ini memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Caranya adalah melakukan diskusi publik para mahasiswa sebagaimana telah menjadi tradisi perguruan tinggi, kemudian mengadopsi isu-isu yang berkembang di luar untuk diuji kebenarannya menggunakan metodologi ilmiah. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh kaum akademisi yang dapat dimainkan sebagai *bargaining* dalam pencerahan masyarakat. *Bargaining* yang saya maksudkan itu adalah kelincahan argumentasi para dosen selaku kaum intelektual untuk menetralkan paham radikalisme yang berkembang di dalam masyarakat. Apalagi bahwa radikal itu bukan budaya kita bangsa Indonesia. Lihat contoh kaum pedagang yang menyebarkan Islam dulu, mereka tidak melakukannya dengan kekerasan. Budaya lokal kita juga tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Orang yang radikal itu sebenarnya juga orang yang pintar, oleh karena itu juga harus dilawan dengan kepintaran. Maka disinilah domain kaum akademisi sebagai kaum intelektual.”⁶¹

Dari penjelasan tersebut, sesungguhnya paham radikalisme agama baik itu di sekolah maupun di kampus pastinya dapat ditolak dengan menggunakan cara yang “canggih” terutama dengan melibatkan peran penting guru dan dosen. Karena hampir setiap guru dan dosen di sekolah-sekolah dan kampus sepakat bahwa doktrin paham

⁶¹ Prof. Dr. Andi Nuzul, seorang akademisi sekaligus Wakil Ketua I STAIN Watampone, hasil wawancara tanggal 23 September 2015.

keagamaan kelompok radikal tersebut sangat bertolak belakang dengan paham keagamaan yang dianut dan diamalkan oleh umat Islam di Indonesia. Meskipun aliran radikal saat ini mampu memasuki beragam sektor, diantaranya mulai dari pendidik, pedagang, siswa, mahasiswa, dan mereka masuk menembus lintas generasi, serta lintas profesi, namun dalam jangka panjang dapat terus dieliminasi pada tingkat paling rendah dengan pelibatan peran kaum pendidik di institusi-institusi pendidikan.

Untuk memutus regenerasi paham radikalisme, di setiap jalur pendidikan dilakukan penguatan dan penataan pemahaman dalam berbagai disiplin ilmu yang dipelajari oleh siswa dan mahasiswa. Sehingga yang ditata dan diluruskan bukan hanya pelajaran atau mata kuliah agama saja, melainkan semua mata kuliah perlu disampaikan dalam pendekatan yang humanis dan toleran dengan berbasis pada penguatan mental dan karakter nasionalisme mahasiswa. Disinilah peran para guru dan dosen sangat strategis mengingat mereka (kelompok radikal) masuk lewat pemahaman pendidikan di dalam dan di luar kelas.

Dalam Laporan Tahunan SETARA Institute misalnya, untuk memastikan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, salah satu dari 11 rekomendasi kepada pemerintah adalah masyarakat dan kalangan pendidikan perlu mendorong penguatan kembali nilai-nilai toleransi yang menjadi modal sosial bangsa di masa lalu yang saat ini telah terkikis oleh berbagai perubahan sosial. Perlu mengembangkan pendidikan kewargaan, pendidikan religiusitas universal, dan pendidikan budi pekerti.⁶² Rekomendasi ini sekaligus memberi penguatan bagi peran guru dan dosen melalui revitalisasi muatan dan proses pendidikan guna melawan penyebaran perilaku kekerasan

⁶² Ismail Hasani, *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara Dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, Publikasi Setara Institute, 2009, hlm xv.

dalam jangka panjang yang bisa menyebabkan hilangnya identitas kaum muda sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa.

Pada bagian lain Herni Susanti juga menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena radikalisme di kalangan kaum muda, yakni: *Pertama*, dinamika sosial politik di fase awal transisi menuju demokrasi yang membuka struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) yang baru di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian. *Kedua*, adalah terjadinya transformasi ekstrem gerakan radikal Islam yang sebagian memiliki geneologi pada awal kemerdekaan. *Ketiga*, tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda di Indonesia. Ketiga faktor inilah yang berjaln berkelindan menyebabkan radikalisme mendapat tempat yang subur di kalangan generasi muda. Maka tentu peran guru dan dosen dalam proses pembelajaran sangat vital bagi upaya membendung radikalisme di kalangan generasi muda.⁶³

Sejak awal, para guru dan dosen perlu menyadari peran pentingnya dalam menanamkan pendidikan kewargaan yang multikultural dan anti kekerasan. Sebagai ikhtiar untuk membendung radikalisme di kalangan kaum muda, sudah seharusnya memperhatikan secara serius proses radikalisasi kaum muda di berbagai lembaga pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.

Terlebih, radikalisasi kaum muda sering terjadi melalui proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan sekolah dan kampus. Kurangnya diskursus keagamaan yang damai di kalangan siswa dan mahasiswa, bahkan sebagian guru dan dosen kerap membiarkan mereka menjadi sangat terbuka untuk menerima berbagai ideologi radikal yang dihembuskan tanpa melakukan proses filterisasi yang

⁶³ Herni Susanti mengutip Najib Azca, *Yang Muda Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim Di Indonesia Pasca Orde Baru*, dimuat dalam *Jurnal Ma'arif* Vol 8, No 1- Juli 2013, hlm 14.

kritis. Hal ini dapat berakibat fatal, anak muda yang mudah terpancing dan terjebak dalam paham hitam-putih radikalisme, sebetulnya mereka sedang menggali kubur masa depannya sendiri.

Berbagai macam peristiwa seringkali terpublikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari beragam aktivitas masyarakat dalam memperjuangkan kehidupan, isu-isu politik yang terus diusung dan dikembangkan secara terus-menerus sehingga menjadi perbincangan yang menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Dan salah satu isu yang terus mengemuka saat ini adalah isu tentang paham radikalisme yang telah mengancam siapa pun termasuk kalangan muda.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak termasuk kalangan muda yang memiliki integritas dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Peristiwa radikalisme terhadap generasi muda telah menjadi perhatian serius oleh banyak kalangan tidak terkecuali oleh kalangan intelektual muslim diseluruh tanah air. Dimana serangkaian aksi para pelaku dan simpatisan pendukung baik aktif maupun pasif banyak berasal dari kalangan usia muda. Hal tersebut tentu tidak boleh dibiarkan, generasi muda Indonesia harus kembali mengkaji dan mencegah segala kemungkinan yang terjadi di kalangan mereka.

Mengingat virus radikalisme dapat menjangkit siapa saja termasuk kalangan muda yang seringkali rentan terjangkit virus tersebut sehingga dapat ringan tangan melakukan kerusakan, pertikaian, penganiayaan dan penyerangan terhadap kelompok yang berseberangan. Dengan demikian, perlu dijadikan referensi agar generasi muda dapat menjaga diri dari bahaya dan ancaman ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Sementara akibat yang akan ditanggung jika hal tersebut terus dibiarkan dan tidak segera dicari penawarnya, virus radikal akan semakin menjalar dan menular ke

skala yang lebih luas dan tentunya menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, bahkan mengancam keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.

Lalu bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan oleh para guru dan dosen? Menurut penulis, membangun dan menumbuh-kembangkan kesadaran kolektif tentang ancaman dan bahaya radikalisme di kalangan kaum muda adalah pekerjaan yang amat berat yang harus dipikul oleh para guru dan dosen. Kemudian melakukan edukasi siswa dan mahasiswa serta masyarakat dan lingkungan sosial pendidikan. Sehingga tumbuh sikap saling menghargai dan menghormati dalam pergaulan antar agama dan antar bangsa dalam suasana yang penuh persamaan dan persaudaraan harus dapat ditumbuhkan dari setiap jiwa generasi muda.

Para dosen dan guru harus mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa harapan terbesar adalah jangan sampai ideologi radikalisme berkembang, bahkan mengakar dan menyebar dikalangan generasi muda, oleh karenanya perlu dikaji dan direpson secara serius, bahkan dilakukan penanganan-penanganan khusus oleh berbagai pihak melalui program-program yang preventif dan edukatif baik skala regional, nasional, maupun internasional.

Sebab, jika generasi muda telah terkontaminasi dengan pemahaman ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, maka mereka akan kehilangan masa depan yang cerah. Hal ini disebabkan karena energi mereka hanya berpusat pada kekerasan, penganiayaan, peperangan dan melakukan pemboman seperti yang dilakukan oleh para pelaku radikal dan teroris dan pada akhirnya mereka akan mati tak berdaya dan menjadi generasi yang lemah.

Namun sebaliknya, para generasi muda yang baik dan berjiwa damailah yang akan tumbuh dan berkembang di masyarakat yang berperadaban, sehingga mereka akan

memimpin bangsa ini dengan baik. Oleh karena itu peran guru dan "jihad akademik" para kaum akademisi bukan saja bagaimana menjauhkan siswa dan mahasiswa dari perilaku kekerasan, perusakan, penganiayaan, terlebih membuat bom dan melakukan aksi bom bunuh diri, tetapi peran mereka adalah menciptakan kesadaran kolektif bahwa tidak ada masa depan bagi radikalisme. Sudah selayaknya memperkuat kesadaran mereka bahwa tugas pokok para kaum muda adalah menuntut ilmu bagaimana belajar sebaik mungkin dan menggapai cita-cita setinggi-tingginya hingga mencapai predikat terbaik pada bidang akademis dan bidang lainnya.⁶⁴

Karena sesungguhnya musuh kaum beragama sekarang adalah kebodohan, kemiskinan dan kemunduran itu sendiri. Jika masyarakat mampu mengatasi musuh tersebut, maka akan muncul generasi pemenang dan kejayaan Indonesia di masa depan akan menjadi cerah. Fundamentalisme radikal dapat dicegah seiring tumbuhnya kedewasaan umat beragama. Kedewasaan umat beragama itu akan tumbuh jika mereka mendapat pemahaman yang memadai tentang pluralitas dan pentingnya toleransi beragama melalui peran vital lembaga pendidikan sebagai gudang produksi generasi muda dan tempat penyemaian ilmu pengetahuan.

b. Memanfaatkan Keuntungan Strategis Jumlah Institusi Pendidikan Islam

Selain berperan melindungi institusi pendidikan dari ancaman radikalisme, peran para guru dan dosen dalam penanggulangan radikalisme bisa juga diukur dari sangat besarnya jumlah institusi pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam. Jumlah institusi pendidikan yang besar tentunya akan berbanding lurus dengan peran serta para pihak yang terlibat di dalamnya termasuk peran serta para guru maupun dosen sebagai pengemban amanah mendidik dan mengajar kepada para peserta didik.

⁶⁴ *Ibid.*

Menurut Syamsul Arifin dalam penelitiannya,⁶⁵ salah satu institusi yang perlu dioptimalkan terkait dengan upaya membendung arus radikalisasi adalah institusi pendidikan Islam. Ekspektasi terhadap institusi pendidikan biasanya ditujukan kepada umat Islam. Disamping mempertimbangkan latar belakang keagamaan para pelaku aksi radikal dan terorisme, ekspektasi tersebut juga didasarkan pada pertimbangan strategis, yaitu banyaknya institusi pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam.

Muhammadiyah misalnya memiliki 10.381 institusi pendidikan dalam semua jenjang dan jenis. Jika ditambah dengan masjid dan mushollah yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pendidikan, maka angka tersebut dapat bertambah. Masjid dan mushollah yang dimiliki Muhammadiyah berjumlah 11.198 buah. Sedangkan institusi pendidikan yang berada di bawah naungan NU jumlahnya lebih banyak daripada jumlah institusi pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah.

Berdasarkan data pada laman www.maarif-nu.or.id, NU memiliki 12.000 madrasah, sedangkan pendidikan yang berbentuk pesantren menurut data dari www.pendis.kemenag.go.id berjumlah 27.230 dengan jumlah santri sebanyak 3.759.198 orang. Seluruh pesantren tersebut sebagian besar berafiliasi ke NU. Jika ditambah dengan institusi pendidikan yang dimiliki oleh ormas Islam lainnya, maka potensi untuk membendung radikalisasi semakin besar.

Sedangkan pada level pendidikan tinggi, menurut data dari laman www.diktis.kemenag.go.id jumlah perguruan tinggi Islam (PTKIN:UIN,IAIN, dan STAIN) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama berjumlah 55 Perguruan Tinggi Negeri dan 563 Perguruan Tinggi Swasta dengan total mahasiswa sekitar

⁶⁵ Syamsul Arifin, *Multikulturalisme Dalam Skema Deradikalisasi Paham dan Gerakan Keagamaan Radikal di Indonesia*, hasil penelitian disampaikan dalam forum Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XIV) Kementerian Agama RI, 21-24 November 2014 di Balikpapan, hlm 29-32.

700.000 orang. Angka ini pasti akan bertambah semakin gemuk bila digabung dengan jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ini adalah modal sosial (*social capital*) yang sangat signifikan yang dapat diandalkan dalam menangkal laju perkembangan paham radikalisme terutama di lingkungan siswa dan pemuda. Apalagi mengingat bahwa sekitar 88% penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga itu juga memberi gambaran bahwa hampir 90% mahasiswa yang kuliah di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia juga adalah mahasiswa muslim yang dapat menjadi benteng penangkal bagi masuknya paham radikalisme tersebut.

Lalu bagaimana peran guru serta siswa di pesantren dan madrasah dapat berkolaborasi dan bermuarah pada peran penanggulangan radikalisme bersama dengan elemen mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi? Menteri Agama pernah menjelaskan hal tersebut dalam sambutan pada acara peresmian transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan di Istana Negara pada 19 Desember 2014.⁶⁶ Di hadapan Presiden, Menteri Agama menjelaskan bahwa secara kultural dan sosial, Perguruan Tinggi Islam adalah merupakan saluran mobilitas sosial paling penting bagi anak-anak muslim dari madrasah dan santri pesantren yang umumnya berasal dari pedesaan dan kampung-kampung di berbagai pelosok Indonesia.

Potensi perguruan tinggi Islam ini kemudian menjadi katalisator bagi tumbuhnya kelas menengah muslim yang berasal dari berbagai lapisan sosial masyarakat. Sebab mobilitas sosial anak-anak muslim itu telah mendorong pertumbuhan pembangunan masyarakat desa yang berbasis pada nilai-nilai ke-Islaman sebaliknya mereka dari

⁶⁶ Pidato Menteri Agama RI pada peresmian transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan di Istana Negara tanggal 19 Desember 2014. Diunduh dari www.diktis.kemenag.go.id tanggal 17 Mei 2015.

menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi Islam. Potensi kedua, perguruan tinggi Islam berada pada basis-basis komunitas muslim dengan segala variannya. Pada saat yang sama perguruan tinggi Islam berada pada lingkungan sosiologis yang majemuk baik suku, bahasa, dan agama. Posisi ini sangat menguntungkan karena dengan begitu Perguruan Tinggi Islam menjadi “penyangga wilayah” yang berfungsi sebagai penjaga moralitas, stabilitas, dan harmoni sosial berlandaskan nilai-nilai agama.

Ketiga, Menteri Agama berpendapat bahwa Perguruan Tinggi Islam merupakan ‘berkah’ bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Indonesia yang demokratis dan pluralistik seperti sekarang ini sedikit banyak merupakan sumbangan Perguruan Tinggi Islam. Mengapa? Karena PTAI telah melahirkan intelektual dan aktivis muslim yang berwawasan Islami, pemahaman Islam yang progresif, inklusif, rasional, dan moderat yang kompatibel dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju negara demokrasi terbesar di dunia. Intelektual dan aktivis muslim itulah yang menjadi penggerak dan motivator masyarakat melalui berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, diniyah, lembaga dakwah, masjid, majelis ta’lim, pendidikan al-Qur’an, maupun lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga wakaf, lembaga zakat, infaq dan shodaqoh, dan sebagainya.

Keempat, Perguruan Tinggi berperan sebagai perekat NKRI. Bagi mayoritas muslim Indonesia, bentuk negara Indonesia adalah final. NKRI adalah bentuk ideal negara yang dicita-citakan bangsa ini. Melalui kajian ke-Islaman yang moderat, inklusif, tetapi modern, perguruan tinggi menjadi perekat yang efektif dari berbagai pandangan keagamaan yang beragam dan menjadi “melting pot” dari berbagai faham keagamaan yang ada di Indonesia. Banyak tokoh muslim yang lahir dari rahim Perguruan Tinggi

Islam menjadi juru bicara Islam Indonesia yang ramah, toleran, berbudaya, dan damai ke kancah internasional. Bahkan beberapa dosen UIN dan IAIN mendapatkan pengakuan internasional (*international recognition*) menjadi pengajar di sejumlah universitas terkemuka di Amerika, Australia, Inggris, Belanda, Belgia, Maroko, Tunisia, Austria, dan Singapura.

Sedangkan yang kelima, peran fundamental Perguruan tinggi Islam adalah menjadi unsur perekat kebangsaan yang dilandasi nilai-nilai luhur agama; menciptakan infrastruktur keberagaman yang moderat; mendukung suasana Indonesia yang demokratis; dan menyiapkan warga bangsa yang menghargai kemajemukan, perbedaan pendapat, toleran, santun, dan inklusif. Hal ini selaras dengan proses pembelajaran di Perguruan Tinggi Islam yang ditujukan untuk membekali mahasiswa memiliki kepribadian muslim yang baik, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan pemahaman keagamaan yang moderat, rasional, dan modern guna mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil-'âlamîn*).

Menurut Menteri Agama, besarnya potensi yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Islam sebagai benteng Islam Indonesia yang damai sekaligus menjadi penawar bagi ancaman radikalisme adalah bahwa Perguruan tinggi Islam adalah satu di antara sekian banyak potensi yang dimiliki umat Islam dan bangsa Indonesia. Selain Perguruan Tinggi Islam, Indonesia memiliki lembaga pendidikan pesantren, madrasah, sekolah-sekolah Islam, diniyah, pendidikan al-Qur'an, majelis ta'lim, dan lembaga-lembaga keagamaan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu tersebar di seluruh pelosok Nusantara.

Beberapa peneliti menyebutkan bahwa perkembangan lembaga/satuan pendidikan Islam di Indonesia memiliki keunikan (*distingsi*) yang tidak ditemukan di

masyarakat bangsa lain, di Timur maupun Barat. Pesantren tidak ada padanannya dengan sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang di Timur Tengah sekalipun. Pesantren adalah hasil kreatifitas dan produk asli Indonesia (*indigenous education*). Madrasah, meskipun ada kesamaan nama dengan lembaga pendidikan di negara lain, namun madrasah di Indonesia memiliki ciri yang unik. Mengajarkan agama secara modern juga pendidikan umum. Pertumbuhan Diniyah, Majelis Ta'lim, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang fenomenal di Indonesia juga tidak bisa ditemukan di negara manapun di dunia. Perguruan Tinggi Islam yang berjumlah 644 lembaga merupakan jumlah paling banyak yang bisa ditemui di negara-negara Islam.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia adalah kemajuan fenomenal yang dampaknya berjangkauan luas terhadap masa depan bangsa Indonesia. Pendidikan Islam sangat dibutuhkan negeri ini. Oleh karena itu Kementerian Agama mencanangkan untuk menjadikan Indonesia sebagai "kiblat pendidikan Islam dunia". Karena selama ini ada kesan bahwa kiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab, maka sudah saatnya Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam bagi warga dunia. Selain jumlah dan bentuk satuan pendidikan Islam di Indonesia yang beragam dan khas (*distingtif*), muslim Nusantara memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam di Indonesia yang didasarkan pada beberapa alasan:

Pertama, Indonesia merupakan negara demokratis terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat negara-negara Islam Timur Tengah, terutama kasawan Arab, dilanda persoalan politik yang berujung pada suasana kaotik, bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk muslim mayoritas menjadi magnet baru bagi bangsa-bangsa lain sebagai contoh pelaksanaan demokrasi, hubungan antar agama yang

harmonis, pluralisme, kemajuan ekonomi, dan kompatibilitas Islam dan hak-hak asasi manusia.

Kedua, Indonesia dipercaya oleh negara-negara Islam untuk menyelenggarakan even-even internasional tentang Islam. *Ketiga*, performa jamaah haji Indonesia di mata dunia juga sangat positif. Pelaksanaan haji Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi. Selain jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, haji dapat dijadikan ajang promosi yang luar biasa tentang Islam Indonesia.

Keempat, beberapa Perguruan Tinggi Islam telah memiliki mahasiswa asing dengan jumlah yang besar. Ada ratusan mahasiswa berasal dari Australia, Amerika, Mesir, Yaman, Maroko, Vatikan, Rusia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, dan seterusnya. Sejumlah UIN dan IAIN telah membuka kelas internasional. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan minat dan kepercayaan internasional yang semakin tinggi terhadap Indonesia yang aman, damai, dan merupakan bangsa muslim paling demokratis di dunia. Sehingga ke depan diharapkan, Islam Indonesia akan menjadi *trade-mark* bagi bangsa Indonesia dan menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain belajar Islam.

c. Membangun Kemampuan Strategis Pendidikan Melawan Radikalisme

Umat Islam sesungguhnya memiliki cukup modal (*capital*), setidaknya secara kelembagaan untuk membendung arus radikalisasi. Maka dalam konteks peran tersebut, institusi pendidikan dan pendidikan Islam khususnya sejauh ini telah terlibat secara mendalam dalam program radikalisasi. Tentu ujung tombak penanggulangan radikalisme pada berbagai institusi pendidikan adalah para guru dan dosen yang mutlak harus diberi ruang yang luas dalam mencegah tumbuhnya radikalisme khususnya di kalangan pelajar dan pemuda.

Maka menurut Syamsul Arifin dalam penelitiannya, setidaknya ada dua hal yang sejauh ini pada berbagai sekolah dan perguruan tinggi telah dilakukan dalam rangka memperkuat peran sekolah dan kampus dalam membendung arus radikalisme. *Pertama*, melakukan deteksi secara dini (*early warning*) terhadap pergerakan paham radikal baik yang terjadi melalui proses dari atas ke bawah (*top down process*) yang dilakukan oleh pihak luar kepada para siswa atau mahasiswa, maupun yang dilakukan dari bawah ke atas (*bottom-up process*) yang terjadi melalui peran individu siswa atau mahasiswa sendiri mengeksplorasi paham radikal melalui berbagai sumber sehingga ia terinfiltrasi.

Deteksi secara dini terhadap kaum belia perlu dilakukan, karena infiltrasi paham radikal dan rekrutment menjadi bagian dalam organisasi paham radikal menurut sejumlah hasil penelitian lebih muda dilakukan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ma'arif institute tahun 2011 menunjukkan fenomena penting bahwa sekolah menjadi "ruang terbuka" yang bisa dimanfaatkan untuk mendeseminasikan paham apa saja. Karakteristik "ruang" sekolah yang demikian dapat dimanfaatkan oleh organisasi keagamaan radikal sehingga siswa memiliki paham radikal terhadap isu-isu tertentu seperti isu negara Islam, penegakan syari'at Islam dan kelompok lain di luar Islam.

Temuan lain oleh lembaga kajian Islam perdamaian (LaKIP) adalah hampir 50 % siswa sejabodetabek setuju tindakan kekerasan atau aksi radikal demi agama. Kemudian 14,2 % siswa setuju dengan aksi terorisme yang dilakukan Imam Samudra dan Noordin M Top, lalu 84,8 % siswa setuju terhadap penegakan syari'at Islam, kemudian 25,8 % siswa menyatakan Pancasila tidak relevan lagi sebagai ideologi negara. Sedangkan hasil survey dari pusat pengkajian Islam (PPIM) UIN Jakarta pada 2008 menemukan bahwa ternyata paham radikal juga berkembang di kalangan guru agama Islam.

Deteksi secara dini menuntut adanya suatu pola hubungan yang memungkinkan orang-orang terutama pihak pengajar memiliki kepekaan terhadap perubahan paham keagamaan individu di sekitarnya (murid dan teman). Dalam kajian psikologi sosial dikenal dua pola interaksi. Pertama, hubungan pertukaran (*exchange relationship*). Hubungan semacam ini lebih banyak didasarkan pada kalkulasi-kalkulasi keterpenuhan kepentingan antar kedua belah pihak. Kedua, hubungan komunal (*communal relationship*). Dalam lingkungan pendidikan, pola hubungan seperti ini perlu dikembangkan karena keterikatan individu dalam suatu kelompok lebih didasarkan pada kasih sayang, kesetaraan, keadilan, perasaan ke-kita-an.

Dengan demikian pola hubungan yang perlu dikembangkan dalam rangka deteksi dini adalah pola hubungan komunal. Terkadang muncul reaksi secara keras dengan berbagai pertimbangan yang berakibat pengucilan terhadap individu yang dinilai memiliki paham radikal. Tindakan seperti ini malah kian memperkuat proses infiltrasi paham radikal pada individu. Hal ini berbeda kalau dikembangkan pola hubungan komunal karena proses terhadap individu yang terinfiltrasi paham radikal dilakukan secara persuasif, sehingga individu bisa dikembalikan kepada paham moderat.

Kemudian langkah kedua yang sejauh ini mulai ramai dilakukan oleh institusi pendidikan dalam rangka deradikalisasi adalah dengan mengembangkan suatu model pendidikan yang dapat mencegah terjadinya infiltrasi paham radikal. Model ini perlu mengacu pada suatu desain utuh yang memuat: kerangka pandang yang mendasar terhadap Islam, materi pembelajaran, model pembelajaran, serta lingkungan yang dapat menumbuhkan pengetahuan dan sikap toleran dan kooperatif terhadap pihak yang berbeda baik berbeda agama maupun berbeda budaya.

Bila dibuat konseptualisasi, maka model pendidikan ini dapat disebut dengan model pendidikan multikultural. Dengan demikian dapat dipertegas bahwa model pendidikan yang perlu dikembangkan dalam rangka deradikalisasi adalah model pendidikan multikultural. Pada level praktis maupun akademis, konsep multikulturalisme mendapat sambutan yang sangat positif oleh kaum akademisi maupun oleh komponen-komponen masyarakat sipil termasuk LSM dan ormas-ormas. Indikator luasnya penerimaan terhadap konsep multikulturalisme adalah bisa dicermati pada berbagai aktifitas akademik seperti seminar, loka karya, penelitian, serta publikasi ilmiah yang mengeksplorasinya sebagai karakter dalam berbagai kebijakan di dunia pendidikan.

Misalnya pada tahun 2009, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta menerbitkan buku "Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Multikulturalisme". Institusi pendidikan Pesantren juga telah berupaya mengembangkan kurikulum yang berbasis multikulturalisme seperti penelitian yang dilakukan Abdullah Aly pada 2009 "Budaya Damai Komunitas Pesantren". Pendidikan multikultural menurut Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn merupakan desain pendidikan yang bermaksud untuk mendukung dan memperluas konsep budaya keragaman, kesetaraan, dan demokrasi di dalam konteks sekolah untuk menyiapkan warga yang dapat hidup bersama (*to live together*) dalam harmoni di tengah-tengah perbedaan.

Mengintegrasikan pendidikan dengan multikulturalisme dalam konteks pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam, tentu meniscayakan suatu justifikasi teologis yang dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memuat nilai-nilai sekaligus mendukung pembentukan sikap multikultural.⁶⁷

⁶⁷ Syamsul Arifin, *Op.Cit.*

B. PERAN KELAS MENENGAH MUSLIM DALAM MEWUJUDKAN TOLERANSI BERAGAMA

Dalam penelitian ini, peran kelas menengah muslim dalam mewujudkan toleransi beragama pasca reformasi dapat ditelusuri dari sepak terjang para guru dan dosen di sekolah dan perguruan tinggi serta peran para ulama pesantren dalam menumbuh-kembangkan nilai-nilai toleransi pada lingkungan pendidikan dan masyarakat.

1. Menjadikan Kampus dan Sekolah Sebagai Basis Kehidupan Toleransi

Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan dan keunggulan dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi secara cepat dan tepat. Menurut Ahmad Baedowi dengan mengutip Steven E. Vinkel dalam *Can Tolerance be Taught? Adult Civic Education and the Development of Democratic Values* (2000),⁶⁸ proses pendidikan yang menghargai keragaman, memiliki proses demokratis dan terbuka serta peduli akan tumbuh kembang mental attitude siswa dan mahasiswa adalah prasyarat yang dibutuhkan dalam membangun semangat toleransi. Steven E. Vinkel menyebutkan bahwa mengajarkan toleransi merupakan pintu masuk utama dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang demokratis dan terbuka.

Sekolah dan kampus yang proses belajar mengajarnya memiliki ruang kelas yang demokratis biasanya dicirikan oleh adanya kesadaran guru dan dosen akan keunikan masing-masing peserta didik dimana biasanya hal ini ditunjukkan dengan tanggung jawab para peserta didik terhadap beban belajar masing-masing. Selain itu baik peserta didik maupun para guru dan dosen terbiasa dengan model untuk memaklumi kesalahan dan belajar dari kesalahan serta belajar bagaimana mengelola

⁶⁸ Lihat Ahmad Baedowi, *Paradoks Kebangsaan Siswa Kita*, dimuat dalam Jurnal Ma'arif Vol 8, No 1- Juli 2013, hlm 77-78.

perbedaan secara konstruktif. Selain itu ciri yang menonjol adalah sikap yang dapat ditunjukkan para peserta didik di kelas baik ketika belajar mandiri maupun belajar kelompok.

Proses komunikasi dalam sebuah kelas yang demokratis juga dapat dilihat dari bagaimana proses komunikasi berlangsung dan terjalin. Jika di antara guru dan siswanya terbiasa untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan langsung, maka dapat dipastikan bahwa ruang kelas tersebut sangat demokratis. Mereka akan mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, di mana antara guru dan siswa akan berbagi tanggungjawab untuk saling belajar, saling menolong, saling mendengarkan, bersikap empati serta tidak mengesampingkan pendapat orang lain. Membangun kelas yang demokratis dapat dimulai oleh seorang guru dengan melakukan assessment terhadap kemampuan siswa yang sangat beragam.

Seorang guru harus berusaha menolong muridnya dalam mengidentifikasi tujuan akademis mereka minimal untuk satu tahun ajaran. Semacam collaborative goal setting harus dilakukan. Selain itu penting bagi para guru kita untuk membangun perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan kelas demokratis yang dapat memenuhi kebutuhan siswa. Para guru juga harus mampu melayani dalam setiap level status kepemimpinan, baik ketika berperan sebagai guru, fasilitator, orangtua, bahkan teman bagi siswa.

Dengan demikian guru tersebut memiliki kesadaran untuk memilih kurikulum dan materi yang sesuai dengan tingkat keunikan dan kemampuan siswasiswa mereka yang memiliki gaya kognitif, afektif dan psikomotorik yang berbeda satu sama lain. Meminjam kata-kata Albert O. Hirschman dalam A Bias for Hope (1971), gaya kognitif, afektif dan psikomotorik sekalipun harus bertumpu pada yang *possible*, bukan

yang *probable*. Beragam kemungkinan (*possible*) tersebut bisa didapati ketika sekolah, dengan kesadarannya yang tinggi, selalu berusaha untuk mengembangkan komunikasi lintas budaya, baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau guru dengan guru. Harus diingat bahwa sekolah adalah katalis kuat dalam membangun pemahaman dan persatuan komunitas.

Sekolah juga harus memiliki keinginan kuat untuk mengakui bahwa bahwa pendekatan setiap orang berasal dari perspektif yang unik, dan karena itu setiap bentuk konflik yang terjadi di sekolah harus dimanfaatkan sebagai suatu kesempatan untuk memahami perbedaan pandangan. Sekolah juga harus terbiasa untuk memiliki kepekaan mendengarkan bisikan-bisikan sebelum menjadi teriakan, serta memahami bahwa perbedaan budaya memiliki cara komunikasi yang berbeda pula. Karena itu sekolah harus selalu berusaha menciptakan dan menegakkan kebijakan yang tidak mentolerir diskriminasi, membangun koalisi yang terdiri dari berbagai segmen dalam komunitas, serta mengembangkan keterlibatan para orang tua dan murid yang minoritas. Di atas semuanya, sekolah harus memiliki sistem penanganan konflik secara terpadu seperti manajemen konflik berbasis sekolah (MKBS), agar sekolah selalu siaga terhadap segala jenis ketegangan rasial.

Budaya sekolah harus mampu mengelola kemajemukan berdasarkan kekuatan karakteristik budaya lokal masyarakat di mana sekolah itu berada. Budaya sekolah yang menerima kemajemukan adalah pertanda bahwa komunitas sekolah tersebut memiliki kesadaran akan efek manfaat dan kegunaan budaya sekolah dalam membentuk watak dan karakter siswa yang terbuka dan toleran terhadap perbedaan dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian budaya sekolah sangat baik karena memiliki standar isi dan standar kompetensi yang jelas dalam kurikulum.

Inilah proses pendidikan yang dapat dikembangkan oleh para guru dan dosen di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Titik tekan proses pendidikan adalah adanya kesadaran untuk melakukan penyadaran kepada para guru / dosen dan siswa / mahasiswa secara terus menerus tentang pentingnya menjaga dan melestarikan kemajemukan tersebut. Oleh karena itu pengintegrasian materi agama dan kewarganegaraan dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Salah satu makna penting pengintegrasian pengajaran agama dan kewarganegaraan ke dalam satu paket adalah dalam rangka menumbuhkan semangat toleransi dan kebersamaan siswa sebagai anak bangsa Indonesia.

Terkait dengan kebijakan menjadikan institusi pendidikan sebagai basis penguatan nilai toleransi di kalangan kaum muda, salah seorang akademisi menjelaskan pengalamannya selama ini:

“Setidaknya tulisan-tulisan saya di media massa selama ini sering diambil sebagai referensi oleh sebagian kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Saya kira toleransi memang sangat penting, karena kita ini majemuk. Jika nilai toleransi hilang dalam masyarakat majemuk maka akan memunculkan sikap-sikap radikal. Kita ini majemuk secara budaya, etnis, bahasa, dan agama, oleh karena itu perlu penguatan nilai toleransi di tengah masyarakat. Ajaran Syi’ah misalnya sebagaimana selalu menjadi perdebatan banyak orang yang kerap berbuat kekerasan, sebenarnya tidak seperti yang sering dipahami banyak orang tersebut, mereka pada dasarnya sama dengan kita Islam, meskipun ada praktek-praktek yang berbeda. Toleransi itu harus mampu dipupuk oleh lembaga pendidikan”.⁶⁹

Oleh karena itu, meskipun Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, diharapkan pengajaran agama dan kewarganegaraan dapat meredam semangat tirani mayoritas yang cenderung melegalkan dan menganggap segala sesuatunya sebagai milik mayoritas. Dengan demikian pengajaran agama dan kewarganegaraan berpotensi untuk menjadikan siswa kita sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*) yang

⁶⁹ Prof. Dr. Andi Nuzul, *Op.Cit.*

memiliki sikap toleransi yang kuat dalam menopang semangat nasionalisme dan persatuan. Prinsip-prinsip *good citizenship* yang diambil dari proses pengajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan juga akan membuat siswa lebih aktif terlibat dalam proses politik secara sehat, karena basis pengetahuan mereka secara agamis dan ketatanegaraan pasti akan lebih baik.

Pengintegrasian tersebut juga diharapkan akan mampu mendorong sikap-sikap siswa yang lebih toleran dalam rangka membantu penguatan sistem demokrasi yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia (Elizabeth Theiss-Morse and John R. Hibbing: *Citizenship and Civic Engagement*, 2005). Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, tradisi dan bahasa yang sangat banyak dan beragam, sudah selayaknya untuk bersyukur dan menjaga dengan sepenuh hati keragaman tersebut. Salah satu cara yang paling kuat dan strategis dalam menjaga kemajemukan ini adalah proses pendidikan yang benar. Titik tekan pada kata "proses pendidikan" adalah adanya kesadaran untuk melakukan penyadaran kepada para guru / dosen dan siswa / mahasiswa secara terus menerus tentang pentingnya menjaga, melestarikan, dan merayakan secara bersama kemajemukan tersebut.

2. Peran Ulama Dalam Membangun Semangat Toleransi

Dulu, Indonesia dikenal dengan negara yang menjunjung tinggi toleransi. Sebab, Indonesia dipandang memiliki nilai-nilai toleransi yang sangat tinggi dengan keadaan bangsa yang beranekaragam, baik dari agama, budaya, suku, maupun ras. Namun gelar itu tampaknya cenderung terancam memudar pasca reformasi. Beberapa peristiwa terjadi misalnya berita tentang pembongkaran sebuah rumah ibadah di Bekasi yang disebutkan belum memiliki izin pembangunan. Padahal sesungguhnya Indonesia membuka peluang seluas-luasnya bagi siapa pun yang menganut dan melaksanakan

kepercayaan yang dianutnya, tidak menutup peluang atau bahkan mempersulitnya. Ibu Pertiwi tidak menginginkan adanya kekerasan di negerinya. Yang menjadi cita-cita dan harapan adalah hidup rukun, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

KH. Hasyim Muzadi, Mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) pernah mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling toleran jika dibanding negara-negara lain di dunia. Pendapat ini muncul ketika banyak kritik yang tertuju kepada rakyat Indonesia, khususnya umat Islam yang dianggap tidak toleran. Slogan *Bhineka Tunggal Ika* yang menjadi simbol dan alat pemersatu rakyat Indonesia, yang mempunyai latar belakang berbeda, baik berbeda suku, agama, ras, maupun adat (SARA) kini fungsinya menurun. Tampaknya kesadaran masyarakat akan pentingnya slogan tersebut kian hilang. Tak ayal kekerasan dan sikap intoleransi masyarakat semakin menjadi-jadi.⁷⁰

Secara konseptual, toleransi sendiri dimaknai sebagai sikap mengakui dan menghargai eksistensi non-muslim dan agama yang dianutnya, tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam karena tidak ada paksaan dalam agama, memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya, tidak mengganggu dan mengusik ketenangan pemeluk agama lain, namun juga mengambil sikap tegas untuk berlepas diri dalam urusan-urusan yang termasuk ranah akidah dan agama mereka. Meskipun penting untuk dicermati, toleransi tidak dimaknai sebagai upaya mencampurkan keyakinan, ritual ibadah, tradisi dan simbol-simbol antar agama-agama. Toleransi dilandaskan pada pengakuan terhadap keberagaman (pluralitas).

⁷⁰ Anynamous, *Membangun Toleransi Beragama*, 26 April 2013. Diunduh dari <http://www.harianhaluan.com>, tanggal 4 Oktober 2015.
Anynamous, *Membangun Toleransi Beragama*, 26 April 2013. Diunduh dari <http://www.harianhaluan.com>, tanggal 4 Oktober 2015.

Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi, karena itu, merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Toleransi juga merupakan bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam.

Lantas, bagaimana sesungguhnya peran para ulama dalam memperkuat paham toleransi di Indonesia selama ini? Sejak dahulu kala dari era para Walisongo hingga saat ini, para ulama Nusantara mampu menginterpretasikan teks-teks keagamaan secara toleran dan moderat. Kemampuan para ulama dan juga umat Islam dalam menerjemahkan ajaran agama dalam bingkai "Islam Indonesia" lahir dari kesadaran sosial, historis, dan intelektual. Sejumlah tokoh ulama Indonesia nyatanya telah berhasil menjadi jembatan antara kepentingan agama dan kepentingan negara dengan menjadikan kepentingan publik (umat) sebagai pondasi keduanya. Terkait kesadaran sosial, historis, dan intelektual para ulama dapat tercermin dari sejumlah argumentasi penerimaan asas kenegaraan yang berlandaskan Pancasila. Argumentasi penerimaan demokrasi dan Pancasila misalnya, lahir dari sejumlah pergumulan intelektual para ulama tentang ada atau tidaknya perintah agama yang *syari'ah* terkait bentuk negara.

Para ulama adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga apa yang diperbuat mereka akan dipercayai dan diikuti oleh masyarakat / umat. Almarhum Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) misalnya, seorang ulama yang sangat

kharismatik dan pernah memimpin ormas NU mengemukakan bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara juga merefleksikan ajaran dari semua agama (di dalam Islam dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* atau kemaslahatan umat). Lebih lanjut diterangkan bahwa Pancasila mampu menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan pada seluruh makhluk (didalam Islam dikenal dengan istilah *rahmatan lil-'alamin*). Oleh sebab itu setiap orang bisa saling membantu untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan duniawi, dan setiap orang bebas beribadah untuk meraih kesejahteraan *ukhrawi* tanpa mengabaikan satu sama lainnya.

Gus Dur memandang aktivitas yang dilakukan oleh gerakan Islam Transnasional yang masuk lewat Wahabi dan Ikhwanul Muslimin ke Indonesia cenderung merusak nilai-nilai Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena gerakan tersebut seringkali menggunakan konsepsi *kafir, murtad* (sebagai simbol keagamaan) untuk menyingkirkan orang lain yang tidak sejalan dengan kepentingan Islam Transnasional tersebut. Gus Dur menerangkan bahwa keselamatan (surga) tidak ditentukan oleh klaim seperti itu, melainkan lewat ketulusan dan keikhlasan dalam beragama dengan berserah diri dan patuh pada apa yang diajarkan oleh (Tuhan) *Allah swt.* Dalam hal ini mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu, dimana ia menegaskan hal tersebut menggunakan konsepsi *man kaffaraakhahu bi-ghairi ta'wil fa huwa kama qala* yang memiliki makna implisit bahwa tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengkafirkan saudaranya tanpa penjelasan yang nyata.

Umumnya para ulama Pesantren baik itu di Jawa maupun di Sulawesi Selatan khususnya, mempercayai bahwa toleransi dan pluralitas keagamaan adalah keharusan yang telah digariskan oleh Tuhan (*sunnatullah*). Meskipun setiap pemeluk agama wajib percaya terhadap ajaran agamanya masing-masing, namun bukan berarti bahwa ajaran

agama lain tidak berhak untuk berkembang hidup. Ulama Pesantren berkeyakinan bahwa setiap agama mengajarkan jalan keselamatan bagi setiap pemeluknya. Oleh sebab itu, maka sikap toleransi (*tasamuh*) dan pluralitas harus dijadikan sebagai kesepakatan moral bersama antar pemeluk agama untuk saling menahan diri, tidak saling melecehkan, tidak saling menyalahkan, dan tidak saling menghalangi pelaksanaan ajaran agama masing-masing.⁷¹

Sehingga dengan demikian para ulama memiliki peran untuk menjelaskan hal tersebut sebagai media pembelajaran ajaran Islam. Dengan kata lain perlu dilakukannya revitalisasi peran ulama pasca infiltrasi gerakan Islam Transnasional ke berbagai sektor keagamaan dan pemerintahan guna mengembalikan pemahaman Islam secara baik dan benar yang telah diselewengkan oleh kepentingan asing.⁷²

Pemikiran Gus Dur yang paling dikenang oleh para pengikutnya ialah Gus Dur ingin memperkenalkan Islam sebagai agama yang terbuka, adil, dan toleran. “Terbuka” terhadap kritik dan saran sebagai bentuk perbaikan terhadap perkembangan kehidupan Islam dan kemajemukan Indonesia, lalu “adil” diartikan sebagai aktivitas yang tidak merugikan masyarakat banyak. Dan “toleran” terhadap terhadap keanekaragaman yang terjadi di masyarakat.

Gus Dur juga dikatakan memiliki sudut pandang tersendiri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, oleh karena itu ia menolak penyeragaman budaya (termasuk agama) sebagai tindakan yang tidak berbudaya.⁷³ Oleh sebab itu sikap toleransi terhadap keanekaragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi perlu untuk

⁷¹ Afifuddin, *Pluralisme Kaum Sarungan: Pesantren dan Deradikalisasi Agama di Sulawesi Selatan*, Lembaga Ladang Kata, Yogyakarta, 2015, hlm 136-141.

⁷² Daniel Maringan Tua, *Penguatan Peran Ulama dan Filter Ajaran Gerakan Islam Transnasional*, wordpress.com, 23 Januari 2015. Diunduh dari <https://danielmaringantua.wordpress.com> tanggal 4 Oktober 2015.

⁷³ Lihat Santoso Listianto, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta, Ar Ruuz, 2004, hlm 118. Sebagaimana dikutip Daniel Maringan Tua, *Ibid*.

menjaga kesatuan dan kedaulatan sebagai bangsa yang majemuk. Hal ini menjadi menarik untuk melihat Indonesia manakala negeri ini senantiasa menyebut dirinya sebagai negara yang demokratis.

C. KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RADIKALISME DAN MEWUJUDKAN TOLERANSI BERAGAMA

Dalam penelitian ini, diungkap dua fokus kebijakan utama negara dan pemerintah dalam rangka menghadapi ancaman radikalisme dan mewujudkan toleransi beragama di Indonesia pasca reformasi yaitu revitalisasi nilai dan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk membangun karakter warga negara, kemudian memperkuat peran Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bertujuan memperbesar pelibatan komponen masyarakat sipil (*civil society*) secara massif.

1. Pembangunan Karakter Warga Negara dan Revitalisasi Nilai Pancasila

Sejak negeri ini diproklamlirkan sebagai negara merdeka, telah disepakati menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, Pancasila harus terus hidup dalam kehidupam masyarakat, sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Pancasila musti menjadi perekat perbedaan kultur yang terbangun dalam masyarakat plural. Pancasila menjadi ideologi bersama oleh semua kelompok masyarakat, bisa juga dimaknai sebagai identitas nasional yang bisa menjadi media dalam menjembatani perbedaan yang muncul.

Namun pasca Orde Baru, Pancasila dianggap menjadi bagian dari Orde Baru yang hilang beriringan dengan reformasi. Sebagai 'gantinya', ideologi global (asing) masuk dengan derasnya dan mempengaruhi anak bangsa. Cita-cita dan semangat utama bangsa tertutup timbunan ideologi luar. Dengan kondisi ini, pemerintah dituntut

berupaya untuk menyegarkan kembali ajaran Pancasila bagi warga negara, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya melalui upaya sistematis pada kurikulum pembelajaran pada semua tingkat satuan pendidikan.

Meskipun untuk itu, pasti diperlukan modal dasar berupa kesadaran dari segenap bangsa Indonesia untuk patuh dan tunduk pada Pancasila yang telah berdiri sekian lama sebagai landasan negara. Sikap tunduk kepada Pancasila tentu tidak bisa dianalogikan dengan tunduk dan patuh kepada ajaran agama yang diyakini setiap orang, sebab Pancasila hanyalah produk manusia, sifatnya terbatas hanya di wilayah Indonesia saja, sementara agama merupakan produk Tuhan yang bersifat universal. Namun terbukti tidak adanya satupun sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan agama.

Mundur ke belakang yaitu di masa Orde Baru, upaya pemerintah untuk menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dibentuk satu badan yang bernama BP7. Badan tersebut merupakan penanggung jawab (*leading sector*) terhadap perumusan, aplikasi, sosialisasi, internalisasi terhadap pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka, dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya, seperti liberalisme, sosialisme, humanisme, nihilisme, maupun ideologi yang berdimensi keagamaan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan. Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila, ditujukan agar tetap responsif menghadapi ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme lebih ditekankan pada penyampaian tiga pesan berikut:

- a. Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu.
- b. Aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum.
- c. Negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, serta berkeadaban.

Sementara itu, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang selalu dijaga kelestariannya adalah:

1. Kebangsaan dan persatuan
2. Kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia
3. Ketuhanan dan toleransi
4. Kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan
5. Demokrasi dan kekeluargaan

Maka dalam upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan gerakan massif berupa pemeliharaan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus menerus secara sinergis dan dinamis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional. Sedangkan salah satu unsur ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi ditingkatkan dalam bentuk :

1. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif
2. Aktualisasi, adaptasi dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru

3. Pengembangan dan penanaman nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam seluruh kehidupan berbangsa, bermasyarakat.⁷⁴

Terkait dengan upaya pemerintah dalam merevitalisasi pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut, Azyumardi Azra menilai ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat yang membuat Pancasila masih marjinal dalam hiruk pikuk perkembangan politik Indonesia. *Pertama*, dalam ingatan bersama banyak kalangan, Pancasila masih dipandang tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang pernah menjadikan Pancasila sebagai alat politik mempertahankan *status quo* kekuasaan. Rezim Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang diindoktrinasikan melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Kedua, liberalisasi politik oleh Presiden B.J. Habibie dengan penghapusan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi, telah memberikan peluang bagi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama. *Ketiga*, desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak memperkuat semangat kedaerahan, berbau nasionalisme lokal yang tumpang tindih dengan etno-nasionalisme dan bahkan sentimen agama.

Faktor-faktor tersebut berdampak kurangnya perhatian publik terhadap Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan garis haluan bersama dalam kehidupan negara Indonesia merupakan aktualisasi tekad bersama segenap warga untuk tetap bersatu ditengah berbagai keragaman. Pancasila sebagai kerangka dan dasar ideologis bangsa Indonesia merupakan sebuah *ideology*, ideologi yang tidak berbasiskan agama manapun. Khususnya dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila adalah sebuah ideologi yang sesuai dengan ajaran agama-agama. Mark Juergensmeyer,

⁷⁴ Abdurrahman, *Peran Serta Pancasila Untuk Mencegah Radikalisme*, 1 Mei 2015. Diunduh dari <http://abdurrahman001.blogspot.co.id> tanggal 4 Oktober 2015.

pernah mengatakan bahwa Pancasila adalah rahmat terselubung bagi bangsa Indonesia. Tidak ada alasan yang valid untuk mengganti pancasila dengan ideologi lainnya.⁷⁵

Pancasila adalah adalah dasar dan prinsip hidup bernegara di Indonesia, dimana persatuan dan kesejahteraan bangsa menjadi poros utamanya. Karenanya tidak berlebihan untuk menyebut Pancasila sebagai cita-cita bangsa yang akan terus dijaga dan diwujudkan. Pengetahuan yang memadai terhadap Pancasila akan melahirkan jati diri bangsa, cinta tanah air, dan semangat nasionalisme kebangsaan, sehingga masyarakat akan cermat dan tidak mudah disusupi paham-paham ekstrem dan radikal.

2. Penguatan Peran FKPT dan Civil Society

Selain fokus pada upaya revitalisasi ideologi Pancasila, sejauh ini pemerintah juga telah berupaya memperkuat keterlibatan masyarakat sipil (*civil society*) dalam menangkal penyebaran paham radikal. Upaya ini sebagai bagian dari pelibatan *multi-stake holder* yang mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat basis moderasi di kalangan masyarakat sipil Indonesia. Sehingga nantinya kebijakan ini diharapkan akan memperkuat kontra-narasi terhadap ideologi terorisme dan radikalisme.

Pemerintah melalui aparat penegak hukum secara simultan melakukan pengkajian serta melakukan pemantauan terhadap wilayah tertentu terutama pada cara pemahaman masyarakat yang terlalu awam terhadap hakekat dari keamanan guna menghindari usaha-usaha provokasi dan penyebaran paham berbahaya. Di samping itu pemerintah juga melakukan pencegahan terhadap resiko adanya gangguan keamanan guna mengurangi dampak negatif.

Program pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme dicanangkan dan dilakukan secara berkelanjutan serta didukung oleh semua komponen sehingga mampu

⁷⁵ Anonymous, *Revitalisasi Pancasila Sebagai Solusi Atas Permasalahan Yang Dihadapi Bangsa Indonesia*, 15 Desember 2011. Diunduh dari www.wordpress.com tanggal 4 Oktober 2015.

mengatasi berbagai permasalahan termasuk kemampuan pemerintah mengambil keputusan strategis. Telah banyak rencana teror yang mampu digagalkan berkat bantuan dan laporan dari masyarakat. Salah satu upayanya dengan membentuk FKPT (Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris) di daerah-daerah guna lebih dapat mengantisipasi berkembangnya radikalisme dan terorisme.

Menurut Agus Surya Bakti, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan strategi kontra radikalisasi atau penangkalan ideologi yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat. Strategi itu dilaksanakan untuk menguatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap penyebaran paham radikal terorisme sekaligus menguatkan wawasan kebangsaan, khususnya kepada pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

Implementasi strategi kontraradikalisasinya adalah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah. Pembentukan FKPT bertujuan menyinergikan upaya pencegahan terorisme yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal guna menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat yang berperan penting sebagai garda terdepan dalam rangka pencegahan terorisme di daerah.

Menurut Agus, sifat FKPT adalah forum koordinasi nonpartisan. Kehadirannya diharapkan mampu menjalin koordinasi terpadu dan integratif dengan elemen pemerintah daerah: kanwil kesbangpolinmas, kanwil dikdasmen, kanwil dikti, kanwil agama, kanwil hukum dan HAM, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta sivitas akademika yang menjadi determinan dalam upaya mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme di daerah.

Dengan dibentuknya FKPT ini, pencegahan terorisme dapat dimulai secara dini dari pekarangan terdepan. Peran strategis FKPT melakukan koordinasi pencegahan terorisme diharapkan terjalin secara terpadu dan terintegrasi, melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah. Itu diharapkan dapat tercapai mengingat FKPT terbentuk dari perwakilan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda, dan media massa yang tentu berpengaruh bagi masyarakat di lingkungannya.⁷⁶

Untuk mengeliminir gerakan radikalisme dan terorisme diperlukan kewaspadaan aparat dan masyarakat terhadap kegiatan oleh sekelompok orang, dengan mencermati gelagat, aktivitas, dan perkumpulan. Menurut analisis militer, kaum radikal yang gemar menebar teror untuk mencapai tujuan politiknya menggunakan berbagai macam cara yang meliputi:

1. Menggumpulkan informasi, publikasi, komunikasi internal, pelatihan, radikalisasi, penghasutan, pengorganisasian dan penguasaan dunia maya (internet) yang disebarakan melalui selebaran atau pesan singkat (SMS).
2. Radikalisasi yang mengatasnamakan agama menciptakan kekerasan tidak saja terhadap agama berbeda tapi juga sesama agama, pendanaan didapat dari cara Multi Level Marketing (MLM), narkoba dan segala cara yang dianggap halal.
3. Propaganda kelompok teroris melalui penyebaran buku jihad, website, sosial media dan radio, baik secara terang-terangan maupun terselubung.

FKPT yang dibentuk pemerintah pada berbagai daerah adalah senjata sosial (*social capital*) paling massif untuk memerangi radikalisme dan terorisme karena terdiri dari semua unsur, instansi terkait dan tokoh masyarakat serta sebagai perpanjangan

⁷⁶ Agus Surya Bakti, *Pencegahan Terorisme Bersifat Semesta*, Kompas 2 Agustus 2013. Diunduh dari www.hariankompas.com tanggal 4 Oktober 2015.

tangan dan mitra strategis BNPT maupun Pemda di daerah yang bersifat koordinatif dan sinergis antara TNI, Polri dan pemangku adat. Membangun sinergi antara TNI-Polri dan komponen masyarakat (*civil society*) bertujuan untuk mendorong peningkatan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme sejak dini yang berbasis kearifan lokal melalui :

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama melalui pendidikan formal dan non formal dengan selalu mewaspadaai kemungkinan timbul dan berkembangnya paham radikal yang menyimpang dari ajaran agama.
2. Peningkatan pengamalan dan hazanah budaya bangsa untuk mencegah radikalisme dan terorisme melalui pemberdayaan lembaga sosial dan lembaga adat.
3. Menjalin kerjasama dengan media massa dalam rangka penguatan kewaspadaan dan kepedulian serta daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh radikalisme.
4. Peningkatan kapasitas dan peran pemuda, perempuan, LSM, toko adat, toko agama, toko masyarakat dalam rangka penguatan masyarakat untuk mencegah radikalisme.
5. Melakukan penelitian pengkajian gejala dan potensi terjadinya radikalisme dan terorisme serta mengembangkan model-model pencegahan, diantaranya temu cepat lapor cepat oleh masyarakat, proaktif jika memandang, merasakan gerakan-gerakan aneh disekitarnya.
6. Membangun pola kerjasama dan koordinasi yang ideal, serta mengefektifkan pencegahan radikalisme dan terorisme berbasis pendekatan kearifan lokal.⁷⁷

⁷⁷ Wing Handoko, *Membangun Sinergitas TNI-POLRI dan Masyarakat Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme*, 11 November 2012. Diunduh dari www.wordpress.com tanggal 4 Oktober 2015.

Melalui FKPT, diharapkan nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat di setiap daerah dapat diperkuat dan diinternalisasikan kembali dalam setiap lini kehidupan melalui sejumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan segenap komponen bangsa. Karena itu, beberapa program yang dilaksanakan FKPT di daerah sedapat mungkin dirumuskan dengan berbasis pada penerapan nilai kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa kesadaran masyarakat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila mulai kembali timbul. Jajak pendapat Kompas menunjukkan bahwa 92,5 persen responden menyatakan perlunya dilakukan penguatan terhadap ideologi Pancasila. Telah muncul kesadaran memasukkan nilai luhur dalam Pancasila dengan pendekatan baru yang menekankan pada semangat edukasi dan bukan indoktrinasi.

Forum ini juga dapat berperan sebagai fasilitator yang menanamkan kedamaian dan toleransi, serta membumikan ajaran agama yang sejalan dengan empat pilar kebangsaan. Pemahaman nilai keagamaan yang damai dan toleran harus disampaikan secara paripurna dan bertanggung jawab oleh para pemuka agama dan tokoh masyarakat karena pemahaman ajaran agama yang setengah-setengah adalah pintu bagi masuknya pemikiran radikal di tengah masyarakat. Karena itu, dengan pembentukan FKPT ini, diharapkan masyarakat makin menyadari bahwa tanggung jawab pencegahan terorisme bukan tugas institusi pemerintah, Polri, dan TNI semata, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat (*civil society*). Sinergitas semua pemangku kepentingan dan pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang bahu-membahu dengan segenap unsur masyarakat adalah suatu keniscayaan dalam pencegahan terorisme.⁷⁸

⁷⁸ Agus Surya Bakti, *Op.Cit.*

Oleh sebab itu, koordinasi bersama aparat keamanan terkait pemantauan intensif terhadap segala bentuk perkembangan situasi khususnya aksi-aksi radikalisme maupun terorisme harus terus digalakkan sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan mewujudkan rasa aman bagi masyarakat.

Bab III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari kajian terhadap peran kelas menengah muslim dalam menghadapi ancaman radikalisme dan mewujudkan toleransi beragama pasca reformasi sebagaimana fokus penelitian ini, beberapa hal menarik yang dapat ditarik sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut:

Pertama, fenomena menyebarnya paham radikalisme pasca reformasi telah melahirkan sebuah kekuatan sosial baru yaitu kelas menengah muslim Indonesia. Dikatakan sebagai kekuatan sosial baru karena latar belakang mencuatnya sosok kelas menengah ini ke permukaan dipicu oleh sebuah kepedulian besar terhadap nasib generasi muda usia terdidik yang terancam oleh radikalisme dan terorisme. Itulah sebabnya kelas menengah muslim ini kemudian menjelma menjadi salah satu kekuatan sosial dan politik yang paling berpengaruh dalam memberi kontribusi bagi penangkalan paham radikalisme dan mewujudkan toleransi beragama.

Dua di antara elemen kelas menengah muslim yang paling berpengaruh tersebut adalah kelompok para ulama di pesantren serta para guru dan akademisi di perguruan tinggi. Ulama pesantren dan kaum akademisi di perguruan tinggi adalah dua sosok kekuatan sosial (*social capital*) terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia, sekaligus sebagai representasi dari masyarakat sipil (*civil society*) yang dapat berfungsi sebagai pengawal perubahan sosial (*social change*) dan sekaligus menjadi benteng yang paling tangguh menghadang laju penyebaran paham radikal di tengah masyarakat, khususnya komunitas kaum muda yang notabene terdiri dari para pelajar dan mahasiswa.

Sebagai salah satu representasi kelas menengah muslim, para guru dan kaum akademisi di berbagai lembaga sekolah dan kampus telah menghadirkan warna cerah bagi tumbuhnya pemahaman keagamaan yang benar serta sikap toleran pada diri generasi muda, khususnya di kalangan siswa dan mahasiswa. Lewat berbagai diskusi publik, proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas, tulisan di media massa, talk show di media elektronik, diseminasi gagasan melalui buku dan artikel adalah serangkaian bentuk peran yang selama ini dilakukan oleh para guru dan dosen dalam rangka melawan penyebaran paham radikal. Sementara para ulama Pesantren melakukannya dengan cara filterisasi paham radikal dalam doktrin pengajaran di lingkungan santri, integrasi kurikulum agama dan umum ke dalam sistem pendidikan Pesantren, serta memperkuat praktek dakwah Islam yang berparadigma *rahmatan lil'alam* kepada masyarakat.

Meskipun di satu sisi, sekolah, pesantren, dan kampus adalah tiga institusi yang paling rawan terhadap penyebaran virus radikalisme, namun pada sisi lainnya ketiga institusi tersebut adalah yang paling tangguh dan paling berdaya yang sangat dapat diandalkan dalam menahan gempuran paham radikalisme dan ekstrimisme pasca reformasi. Dapat dikatakan paling tangguh dan paling berdaya karena ketiga institusi tersebut adalah institusi ilmiah dan akademik yang dihuni oleh masyarakat rasional-intelektual berupa para siswa, mahasiswa, guru, dan para dosen. Ciri dari masyarakat ilmiah adalah rasional, tidak mudah terpengaruh, dan sangat kritis terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Inilah mengapa institusi pendidikan dapat disebut sebagai lembaga paling ideal dan sangat kuat sebagai benteng pertahanan melawan radikalisme dan terorisme.

Kedua, dalam rangka membendung penyebaran paham radikal, pemerintah melakukan sedikitnya dua upaya besar yang diharapkan berdampak signifikan terhadap penangkalan radikalisme tersebut yaitu pertama revitalisasi nilai dan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk memperkuat karakter warga negara dan menanamkan semangat nasionalisme dalam mendukung kehidupan nasional yang plural, toleran, dan damai. Upaya kedua adalah memperkuat peran Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) sebagai patner BNPT dan pemerintah yang bertujuan untuk menghimpun pelibatan masyarakat sipil (*civil society*) secara massif dalam gerakan penanggulangan radikalsme dan terorisme.

B. REFLEKSI

Ideologi radikal mendapat momentum berkembang di tengah melemahnya semangat kebangsaan, munculnya pemahaman ajaran agama yang fanatik dan sempit, melemahnya implementasi pendidikan kewarga-negaraan, tingginya angka kemiskinan, serta tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas. Ini sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan masa depan bangsa. Oleh sebab itu penguatan paham Pancasila melalui pendidikan dan penguatan karakter kebangsaan menjadi tidak terelakkan sebagai perisai untuk mempersempit lingkup penyebaran ideologi radikal di tengah masyarakat. Pendidikan Pancasila dan pembentukan karakter kewarga-negaraan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban selaku warga negara.

Penguatan paham Pancasila dan karakter kebangsaan ini dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah, lingkungan pergaulan, serta di lingkup terkecil yaitu keluarga. Sosialisasi penguatan paham Pancasila dan karakter kebangsaan dilakukan melalui sinergi antara media massa cetak maupun elektronik, serta media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Tujuannya agar masyarakat memiliki pemahaman

komprehensif mengenai toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, cinta tanah air, serta kepedulian antar warga masyarakat.

Dibutuhkan komitmen kuat, dukungan, dan kerja sama antar institusi negara secara simultan dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman penyebaran ideologi radikal. Termasuk diantaranya, penguatan peran keluarga sebagai sarana sosialisasi nilai Pancasila dan karakter kebangsaan yang memainkan peran sangat penting dalam mencegah penyebaran ideologi radikal di kalangan pemuda. Kontrol dan perhatian orang tua terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan para remaja dan anak-anak adalah mekanisme cegah dini yang sangat efektif membentengi menyebarnya ideologi radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, *Pluralisme Kaum Sarungan: Pesantren dan Deradikalisasi Agama di Sulawesi Selatan*, Lembaga Ladang Kata, Yogyakarta, 2015.
- Assyaukanie, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Freedom Institute, Jakarta, 2011.
- Ball, Stephen J., *Class Strategies and the Education Market: the Middle Classes and Social Advantage*, Routledge Falmer, London and New York, 2003.
- Barr-Melej, Patrick, *Reforming Chile: Cultural Politics, Nationalism, and the Rise of the Middle Class*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 2001.
- Brantlinger, Ellen, *Dividing Classes: How the Middle Class Negotiates and Rationalizes School Advantage*, Routledge Falmer 29 West 35th Street, New York-London, 2003.
- Dewanta, Awan S., dalam Riza Noer Arfani, "Demokrasi Indonesia Kontemporer", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Embong, Abdul Rahman, *State-led Modernization and the New Middle Class in Malaysia*, Palgrave Macmillan, London, UK, 2002.
- Fleming, N.C., *Leadership, the Middle Classes and Ulster Unionism Since the Late-Nineteenth Century*, dalam Flintan Lane (Editor), *Politics, Society and the Middle Class in Modern Ireland*, Palgrave Macmillan, London, UK, 2010.
- Hasani, Ismail, *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara Dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*, (Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008), Setara Institute, Jakarta, 2009.

- Hoberek, Andrew, *The Twilight of the Middle Class*, Princeton University Press, Princeton New Jersey, 2005.
- Hwang, Julie Chernov, *Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki*, Freedom Institute, Jakarta, 2011.
- Listianto, Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta, Ar Ruuz, 2004.
- Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mooney, Nan, *Keeping Up With Our Parents: the Decline of the Professional Middle Class*, Beacon Press, Boston, US, 2008.
- Porter, Donal J., *Managing Politics and Islam in Indonesia*, Routledge Curzon, London and New York, 2002.
- Rabasa, Angel (et al.), *Deradicalizing Islamist Extremists*, National Security Research Division, Pittsburgh, 2010.
- Ramage, Douglas E., *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*, Routledge, London and New York, 1995.
- Rubin, Barry (Editor), *Guide to Islamist Movements (volume 1)*, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England, 2010.
- Rubin, Barry and Judith Colp Rubin, *Chronologies of Modern Terrorism*, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England, 2008.
- Salvatore, Armando and Dale F. Eickelman, *Public Islam and the Common Good*, Koninklijke Brill NV, Leiden-Boston, The Netherlands, 2004.
- Schlegel, Stuart A, *Asas-Asas dan Metodologi Penelitian Grounded*, Semarang: Reproduksi oleh Universitas Sebelas Maret Fakultas Sosial Politik, 1982.

Smyth, Jim, *The Men of Property: Politics and the Language of Class in the 1790s*, dalam Flintan Lane (Editor), *Politics, Society and the Middle Class in Modern Ireland*, Palgrave Macmillan, London, UK, 2010.

Turam, Berna, *Between Islam and the State: The Politics of Engagement*, Stanford University Press, Stanford, California, 2007.

Twells, Alison, *The Civilising Mission and the English Middle Class 1792-1850*, Palgrave Macmillan, London, 2009.

Vredembregt, J, *Metode dan Teknik penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1980.

Sumber Jurnal & Makalah Seminar

Arifin, Syamsul, *Multikulturalisme Dalam Skema Deradikalisasi Paham dan Gerakan Keagamaan Radikal di Indonesia*, hasil penelitian disampaikan dalam forum Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XIV) Kementerian Agama RI, 21-24 November 2014 di Balikpapan.

Azca, Najib, *Yang Muda Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim Di Indonesia Pasca Orde Baru*, dimuat dalam Jurnal Ma'arif Vol 8, No 1- Juli 2013.

Baedowi, Ahmad, *Paradoks Kebangsaan Siswa Kita*, dimuat dalam Jurnal Ma'arif Vol 8, No 1- Juli 2013.

Dja'far, Alamsyah M., *Peta Suram Kebebasan Beragama dan Intoleransi di Indonesia*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia" Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012.

Haryatmoko, *Agama-Agama dan Masalah Kekerasan: Proses dari Imajiner Sosial ke Kekerasan*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia” Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Agama, Terorisme, dan Peran Negara*, dimuat dalam Jurnal Ma'arif Vol 8, No 1- Juli 2013.

Misrawi, Zuhairi, *Kontestasi Toleransi dan Intoleransi Bernuansa Agama*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia” Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012.

Qodir, Zuly, *Perspektif Sosiologi Tentang Radikalisme Agama Kaum Muda*, dimuat dalam Jurnal Ma'arif Vol 8, No 1- Juli 2013.

Widnya, I Ketut, *Mencari Penyelesaian Konflik Keagamaan di Indonesia: Sebuah Refleksi Dari Pengalaman Sejarah Hindu*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Menata Keragaman Keagamaan: Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia” Dalam Rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 61, Rabu 12 September 2012.

Sumber Wawancara

Afifuddin, ulama pengasuh pesantren An-Nahda di Makassar, hasil wawancara tanggal 21 September 2015.

Fathurrahman, ulama pengasuh Pesantren Biru di Bone, hasil wawancara tanggal 23 September 2015.

Haddise, akademisi sekaligus Ketua STAIN Watampone, hasil wawancara tanggal 1 Oktober 2015.

Andi Nuzul, akademisi sekaligus Wakil Ketua I STAIN Watampone, hasil wawancara tanggal 23 September 2015.

Sumber Internet & Media Massa

Abdurrahman, Moeslim, *Kelas Menengah Islam dan Multikulturalisme*, www.lkassurabaya.blogspot.com, 10 Agustus 2007, diakses tanggal 23 Februari 2015.

Abdurrahman, *Peran Serta Pancasila Untuk Mencegah Radikalisme*, 1 Mei 2015. Diunduh dari <http://abdurrahman001.blogspot.co.id> tanggal 4 Oktober 2015.

Ali, As'ad Said, *Peran Nahdatul Ulama Dalam Menangkal Radikalisme*, 26 Maret 2015. Diunduh pada tanggal 1 September 2015.

Anonymous, *Kelas Menengah Adalah Upaya Membentuk Sebuah Masyarakat Madani*, Wordpress.com 23 oktober 2010, diakses tanggal 23 Februari 2015.

Anynamous, *Membangun Toleransi Beragama*, 26 April 2013. Diunduh dari <http://www.harianhaluan.com>, tanggal 4 Oktober 2015.

Anonymous, *Revitalisasi Pancasila Sebagai Solusi Atas Permasalahan Yang Dihadapi Bangsa Indonesia*, 15 Desember 2011. Diunduh dari www.wordpress.com tanggal 4 Oktober 2015.

Anonymous, *Hasyim Muzadi beberkan kelemahan pemerintah tangkal paham ISIS*. www.merdeka.com, Selasa 7 April 2015. Diunduh pada tanggal 1 September 2015.

Azra, Azyumardi, *Kelas Menengah Muslim Indonesia*, Harian Republika, Kamis 29 Desember 2012.

Bakti, Agus Surya, *Pencegahan Terorisme Bersifat Semesta*, Kompas 2 Agustus 2013.

Diunduh dari www.hariankompas.com tanggal 4 Oktober 2015.

Hamidin, Forum Sosialisasi Pencegahan Terorisme yang diselenggarakan oleh FKPT Aceh tanggal 19 September 2014. Diunduh dari wordpress.com pada tanggal 20 September 2015.

Menteri Agama RI, naskah pidato pada peresmian transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan di Istana Negara tanggal 19 Desember 2014. Diunduh dari www.diktis.kemenag.go.id tanggal 17 Mei 2015.

Misbahussalam, HM, *Peran Ulama dan Umara Dalam Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*, 14 April 2015. Diunduh di www.muslimedianews.com pada tanggal 1 September 2015.

Sulistyo, Adi, *Radikalisme Keagamaan dan Terorisme*, wordpress.com, 12 Februari 2014.

Suryadinata, Endang, *Terorisme, Radikalisme, dan Deradikalisasi*, dalam harian Sinar Harapan 15 September 2015. Diunduh pada tanggal 1 September 2015.

Susanti, Herni et.all, *Membentengi Pendidikan Dari Radikalisme*, www.wordpress.com. 19 Mei 2015. Diunduh 20 September 2015.

Syam, Nur, *Mewaspada Ideologisasi Agama*, www.lkassurabaya.blogspot.com, 10 Agustus 2007, diakses tanggal 23 Februari 2015.

Tua, Daniel Maringan, *Penguatan Peran Ulama dan Filter Ajaran Gerakan Islam Transnasional*, wordpress.com, 23 Januari 2015. Diunduh dari <https://danielmaringantua.wordpress.com> tanggal 4 Oktober 2015.

Wilonoyudho, Saratri, *Kelas Menengah Islam, Di Mana Kau?* Wordpress.com 25 Januari 2013.

Wing Handoko, *Membangun Sinergitas TNI-POLRI dan Masyarakat Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme*, 11 November 2012. Diunduh dari www.wordpress.com tanggal 4 Oktober 2015.